

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PENGELOLAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA
MENUJU DESA MANDIRI PELAYANAN**
(Studi Kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MURYUSNA

NIM: 017990029

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pekanbaru, Agustus 2013

Yang Menyatakan



MURYUSNA

NIM. 017990029

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir.**

Penyusun TAPM : **MURYUSNA**

N I M : **017990029**

Program Studi : **Administrasi Publik**

Hari/tanggal : **Senin, 16 Agustus 2013**

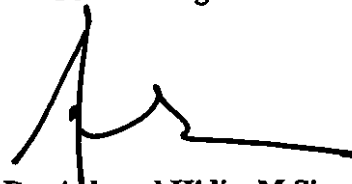
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Febri Yuliani, M.Si
NIP. 19770203 200501 2 003

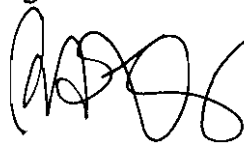
Pembimbing II



Dr. Achmad Hidir, M.Si
NIP. 19640409 199009 1 001

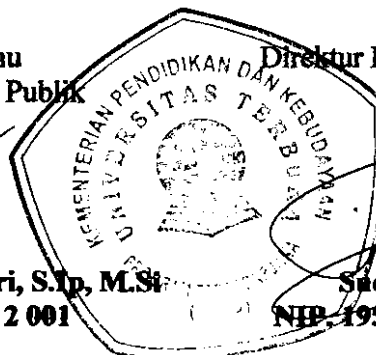
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Magister Administrasi Publik



Florentina Ratih Wnlandari, S.Tp, M.Si
NIP. 197106 091980 2 001

Direktur Program Pascasarjana




Suciati, M.Si, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : MURYUSNA
NIM : 017990029
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL TAPM : Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (*Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hilir.

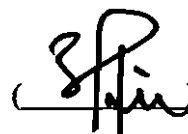
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana, Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka Pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 26 Oktober 2013
Waktu : Jam 12.00 – 14.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang UPBJJ-UT Pekanbaru

Dan telah dinyatakan LULUS

Panitia PENGUJI TAPM :

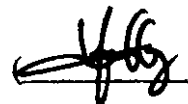
Ketua Komisi Penguji : Drs. ELFIS SUANTO, M.Si



Penguji Ahli : DJAKA PERMANA, M.Si, Ph.D



Pembimbing I : Dr. FEBRI YULIANI, M.Si



Pembimbing II : Dr. ACHMAD HIDIR, M.Si



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURYUSNA
NIM : 017990029
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis (TAPM) : Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Huku) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs-UTA dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru


Drs. Elfis Suanto, M.Si
Nip. 19661002 199103 1 003

Pekanbaru, 2013
Mahasiswa,


Muryusna
Nim. 017990029

Ketua Bidang Ilmu / Program Magister
Manajemen Administrasi Publik

FlorentinaRatihWulandari, S.Ip, M.Si
Nip. 19710609 199802 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
 Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
 Telp. 021-7415050, Fax. 021-7415588

PENDAFTARAN WISUDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Lengkap : MURYUSNA
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat Lahir : Lukok
 Tanggal / Tahun Lahir : 05 Juni 1964
 NIM : 017990029
 Tanggal Ujian Sidang : 26 Oktober 2013
 Judul TAPM : Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Huku) Kabupaten Indragiri Hilir
 Dosen Pembimbing I : Dr. Febri Yuliani, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Dr. Achmad Hidir, M.Si
 Instansi : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir
 Alamat Tetap : Gang Amal No. 25 Perumnas Parit 3 Tembilahan Hulu
 No. Telp / HP : 081365678234
 Hadir dalam upacara wisuda : YA

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 2013

Mengetahui,
 Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru

Yang Mendaftar,



Drs. Elfis Suanto, M.Si
 Nip. 19661002 99103 1 003



Muryusna
 Nim. 017990029

ABSTRAK

Peranan kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri
(Studi kasus di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu)
Kabupaten Indragiri Hilir

Muryusna,
Febri Yuliani, Achmad Hidir
Universitas Terbuka
mur_yusna@yahoo.com

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Pemberdayaan, Desa mandiri.*

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Metode penelitian ini disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, yaitu BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Kelompok Kerja serta Camat selaku koordinator program.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa peranan Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator penelitian antara lain peran pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya, 1). Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, Kepala Desa tidak melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM), 2). Dalam menyusun program kegiatan desa mandiri, kepala desa belum mengutamakan skala prioritas, 3). Strategi yang dilakukan kepala desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat, 4). Alokasi sumber daya belum optimal 5). Dalam pelaksanaan program kegiatan kepala desa tidak menfungsikan penanggung jawab atau kelompok kerja. 6). Dalam mengambil keputusan kepala desa kurang arif dan bijaksana, 7). Sebelum mengambil keputusan, Kepala desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja.

Selain itu peran mempengaruhi, peran memotivasi, peran antar pribadi dan peran informasional juga belum berfungsi secara optimal. Dengan belum optimalnya peran Kepala Desa tersebut, maka pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, juga belum terlaksana sesuai dengan harapan.

ABSTRACT

The role of headman's leadership in rural empowerment program to self-sufficient village
(A case study at Pekan Kamis Sub-District of Tembilahan Hulu Indragiri Hilir)

Muryusna,
Febri Yuliani, Achmad Hidir
Terbuka University
mur_yusna@yahoo.com

Key Words: *Leadership, Empowerment, sufficient village.*

This research is conduct to know the role of headman's leadership of Pekan Kamis of Sub-District Tembilahan Hulu of Indragiri Hilir regency. This research is descriptive qualitative research. This research is a kind of research which has aim to get understanding about the reality through the inductive process of analysis. The methodology of this research is well known with naturalistic research. It is caused the research is done with natural setting. It also well known as qualitative method, because the data collected and qualitative analysis the participant of this research was the people who are directly involved in the management of rural development program toward self-sufficient village at Pekan Kamis village of sub district of Tembilahan Hulu of Indragiri Hilir regency, they are, BPD, LPM, Hamlet Head, Head of District also as the coordinator of programs.

Based on the result of research and analysis that is done with deep interview, it is got that the role of headman's of Pekan Kamis Sub-District Tembilahan Hulu is not optimal yet. It can be seen from the indicators of research that is un-expected of taking decision of problems, namely : 1) In deciding a target of self-sufficient village program, the headman did not involve the team works (BPP & LPM), 2) In arranging of self-sufficient program the headman still not focus on the scale of priority, 3) The strategy done is not focus on people needed, 4) The headman did not release the natural resources yet, 5) In the realization of the program, the headman did not make a coordinator program or not make a team work, 6) In taking decision, the headman has already not show his shrewd and wise, 7) Before taking decision, the headman never ask for other opinion.

The other indicators are, the role of motivation. The role of personalization and the role of information are not optimally worked. Thus, an optimal of the role of headman's leadership has impact to the rural empowerment program to create self-sufficient village in Pekan Kamis village, Sub-District of Tembilahan Hulu is also not worked as it is expected before.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magester ini dengan judul “Peranan kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri (*Studi kasus di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hili”.

Hasil penelitian yang diungkapkan dan dibahas dalam TAPM ini merupakan suatu kajian dalam lingkup program studi Magister Sains di bidang manajemen Administrasi Pulik pada Universitas Terbuka.

Dalam penyelesaian penulisan ini penulis banyak bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada;

1. Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberi izin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Ibu Suciati, M.Sc Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M.Si, selaku Kabid Program Magister Sains Administrasi Publik Universitas Terbuka selaku penanggung jawab program.
4. Bapak Drs. Elfis Suanto, M.Si, selaku Kepala UPBJJ-UT Pekanbaru.
5. Ibu Dr. Febri Yuliani, M.Si., selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan serta saran-saran yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.
6. Bapak Dr. Achmad Hidir, M.Si., selaku pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan serta saran-saran yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini.

7. Seluruh Dosen yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan pada Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru Pokjar Tembilahan-Riau.
8. Tak terlupakan suami tercinta Nashelmi serta anak-anakku tersayang Maharani Putri dan Anggun Yuhellistya yang menjadi inspirasi bagi penulis karena dengan pengorbanan, motivasi dan do'a mereka jumlah penulis dapat mengikuti pendidikan pascasarjana di Universitas Terbuka.
9. Buat abang dan adik-adikku, sanak saudara, handai tolan serta rekan-rekan seperjuangan Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Pekanbaru yang juga telah banyak membantu memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan moril serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan TAPM ini.
10. Ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Pekan Kamis dan Camat Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya, yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa dan Kecamatan yang Beliau pimpin.

Dalam penulisan TAPM ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangannya, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna kesempurnaan TAPM ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dan kita semua.

Pekanbaru, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	13
1. Teori dan Konsep.....	13
2. Kepemimpinan.....	14
3. Tinjauan umum tentang Desa dan Kepala Desa.....	30
4. Pemberdayaan.....	33
5. Program Desa Mandiri.....	36
6. Hasil Penelitian Terdahulu.....	37

B.	Kerangka Berfikir.....	40
C.	Definisi Operasional.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Desain Penelitian.....	43
B.	Informan.....	43
C.	Prosedur Pengumpulan Data.....	45
D.	Metode Analisa Data.....	45
E.	Tahapan Penelitian.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	47
B.	Hasil Penelitian.....	62
C.	Pembahasan.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	94
B.	Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Nomor		Hal
1.1	Target dan Realisasi Program Desa Mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.....	6
1.2	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2008.....	7
1.3	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2009.....	8
1.4	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2010.....	9
1.5	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2011.....	9
1.6	Realisasi Program Kegiatan Tahun 2012.....	10

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Hal
2.1	Model empat dasar gaya kepemimpinan situasional Hersey-Blanchard.....	25
2.2	Empat tingkat kematangan para pengikut Hersyhe dan Blanchard.....	27
2.3	Kerangka Fikir	44
4.1	Struktur Organisasi.....	65

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.

Lampiran 2 Transkrip hasil wawancara.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan Desa pada level yang sangat strategis, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui secara hukum. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama. Otonomi desa dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi.

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan di Desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Selain itu tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan (Abadi, 2003: 44).

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan desa serta peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga (Abdullah, 2007: 172).

Pembangunan desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Peran aktif dari pemerintah sebagai penyedia dana pembangunan tidaklah mampu menyediakan dana untuk pembangunan secara keseluruhan. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan stimulus yang bersifat rangsangan untuk memancing swadaya masyarakat. Pendekatan dan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi juga dinamis serta berkelanjutan dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dengan kegiatan masyarakat.

Sebagai implementasi dari Undang-undang 32 Tahun 2004, dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu terobosan melalui pembangunan infratraktur Pedesaan dengan sistem pemberdayaan masyarakat setempat yang disebut dengan Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2010 pasal 1 butir 14 dikatakan bahwa Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri yang selanjutnya disebut Program Desa Mandiri, adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat pedesaan yang makmur, mandiri dan sejahtera sesuai visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025.

Sebagai tahap awal program ini di uji cobakan pada 55 desa di Indragiri Hilir yang tersebar di 6 Kecamatan. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program bantuan pembangunan desa yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005, hasilnya cukup menggembirakan dan mampu menarik swadaya masyarakat sebesar 19,89 % dari total dana yang di kucurkan. Mengingat program ini cukup berhasil menggerakkan pembangunan di pedesaan maka pada tahun 2006 kembali program ini di luncurkan untuk 171 Desa/ Kelurahan. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 program ini kembali di luncurkan untuk seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 192 Desa/ Kelurahan (175 Desa, 17 Kelurahan).

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa, maka mulai Tahun 2009 otonomi desa sudah diserahkan lebih luas kepada desa, dan sistem penganggarannya sudah menganut sistem Alokasi Dana Desa (ADD), yang dialokasikan secara proporsional dengan beberapa indikator, sehingga pagu dana setiap desa tidak sama besarnya. Sebagai pembelajaran secara berangsur mulai tahun 2009, sebagian kewenangan sudah dilimpahkan kepada desa artinya desa sudah diberikan otonomi, maka penyusunan anggaran desa sepenuhnya diserahkan kepada desa. Dalam penyusunan anggaran desa untuk anggaran rutin/ belanja tidak langsung (honorarium, insentif dan belanja operasional) dirumuskan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan penyusunan penggunaan anggaran pembangunan, Kepala Desa harus melaksanakan musyawarah dengan melibatkan semua unsur pemerintahan desa, kelembagaan desa dan petugas teknis lapangan yang ada di desa. Hasil rumusan penyusunan anggaran desa disampaikan ke Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai leading sektor kegiatan, guna untuk diverifikasi oleh tim fasilitasi dan verifikasi Kabupaten, agar penggunaan dana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu dalam rangka transparansi dan agar unsur Pemerintahan Desa serta Kelembagaan Desa terutama Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM mengerti dan memahami ketentuan dan prosedur pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri, maka dilaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi ini merupakan penjelasan teknis pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, kepada pemerintahan desa, kelembagaan desa dan masyarakat. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan desa, BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir juga menyusun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas hasil pekerjaan sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan.
2. Hasil pekerjaan melebihi dari target yang telah ditetapkan (Over prestasi).
3. Sinerginya lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program kegiatan.
4. Adanya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur program pemberdayaan desa.
5. Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Laporan administrasi keuangan dibuat dan disampaikan setiap bulan.
7. Laporan kemajuan fisik kegiatan pembangunan dibuat dan disampaikan setiap bulan.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan Formal dan Non Formal (BPMPD Kab. Inhil, 2012: 43).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa peran Kepala Desa sangat penting dalam mengkoordinir perangkat desa dan lembaga masyarakat desa agar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan serta dapat memenuhi kriteria yang di tetapkan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Dilihat dari kondisi dan fakta dilapangan, sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, secara fisik program ini 73,16 % sudah dapat dilaksanakan, namun dari segi prosedur dan ketentuan serta kriteria yang harus

dipenuhi oleh desa masih belum sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga berdampak terhadap hasil program yang telah ditetapkan, artinya pada akhir tahun anggaran kegiatan belum dapat dilaksanakan 100%, apalagi mendapatkan over prestasi. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi program yang telah diluncurkan setiap tahunnya, sebagaimana terdapat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Program Desa Mandiri di Desa Pekan Kamis
Kecamatan Tembilian Hulu

No	Tahun	Pembangunan		Jumlah Anggaran (Rp)
		Target	Realisasi (%)	
1	2008	4 Paket	76.67	172.850.000,-
2	2009	5 Paket	80.26	164.182.000,-
3	2010	6 Paket	71.24	140.250.500,-
4	2011	2 Paket	57,12	103.750.000,-
5	2012	4 Paket	73,16	150.307.000,-

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir.

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa mulai dari tahun 2008 sampai tahun 2012, di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilian Hulu belum ada paket kegiatan yang dapat diselesaikan 100 %, bahkan cenderung menurun setiap tahunnya, meskipun ada peningkatan di tahun 2012 dibanding tahun 2011 itupun realisasinya hanya 73,16 %.

Kemudian dilihat dari paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008, dari 4 paket kegiatan yang di programkan, hampir semua paket kegiatan tidak dapat

dilaksanakan 100 % sampai berakhirnya tahun anggaran 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Program Kegiatan Tahun 2008

NO	Jenis Kegiatan	Volume	Realisasi	%	Anggaran
1	Pembuatan badan jalan tanah	1450x3x0.80 M	1153,5 M	79,55	57.000.000,00
2	Semenisasi Jalan Desa	75x1.50x0.10 M	57,35 M	76,47	42.000.000,00
3	Pembangunan Posyandu RT.04	5.00x3.00 M		80,00	31.850.000,00
4	Semenisasi Jalan lingkungan RT.02	75x1.50x0.10 M	53,00 M	70,67	42.000.000,00
Total				76,67	172.850.000,00

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari empat paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2008, tidak satupun paket kegiatan dapat diselesaikan 100% pada akhir tahun anggaran tersebut, kegiatan ini baru dapat diselesaikan pada bulan maret 2009. Meskipun masih dapat diberi dispensasi, tapi dari segi prosedur dan target yang hendak dicapai sudah tidak sesuai lagi dengan harapan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dan masyarakat desa Pekan Kamis.

Berikut ini dapat pula dilihat, paket kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2009, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Program Kegiatan Tahun 2009

NO	Jenis Kegiatan	Volume	Realisasi	%	Anggaran
1	Semenisasi Jalan Merdeka RT.01/RW.01	100x5x0,1 M	81,50 M	81,50	49.379.000,00
2	Semenisasi halaman pasar Desa Tahap I	15x14x0,25 M	167 M ²	79,52	47.589.800,00
3	Semenisasi halaman pasar Desa Tahap II	15x14x0,25 M	170 M ²	80,95	47.589.800,00
4	Penimbunan halaman kantor desa	20x23x0,25 M	360 M ²	80,00	13.723.400
5	Pembuatan badan jalan tanah RT.03	75x2.5x0,8 M	59,50 M	79,33	5.900.000
Total				80,26	164.182.000,00

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari lima paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009, dapat diketahui tidak satupun paket kegiatan dapat diselesaikan 100% pada akhir tahun anggaran tersebut, kegiatan ini baru dapat diselesaikan pada bulan februari 2010.

Selanjutnya dapat pula dilihat, paket kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2010, sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Realisasi Program Kegiatan Tahun 2010

NO	Jenis Kegiatan	Volume	Realisasi	%	Anggaran
1	Rehab Kantor Kepala Desa	1 Unit		70,00	10.757.000,00
2	Semenisasi jalan desa RT.03	118x1,5x0,8 M	81 M	68,64	12.653.500,00
3	Pembangunan WC Umum	3x2 M		70,00	20.468.500,00
4	Pembangunan jalan tanah RT.04	700x2x0,8 M	500 M	71,43	35.244.000,00
5	Semenisasi jalan desa RT.01	193x3x0,8 M	130 M	67,36	40.659.000,00
6	Pembangunan WC Umum Pasar Desa	3x2 M		80,00	20.468.500,00
Total				71,24	140.250.500,00

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari enam paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010, tidak satupun paket kegiatan yang dapat diselesaikan 100% pada akhir tahun anggaran tersebut, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berikut dapat pula dilihat program kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri tahun 2011, sebagaimana pada tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5
Realisasi Program kegiatan Tahun 2011

NO	Jenis Kegiatan	Volume	Realisasi	%	Anggaran
1	Semenisasi hlman kantor desa	17x6x0,10 M	10 M	58,82	12.445.000,00
2	Pengurukan sirtu jljan ke Pelabuhan	415x3x0,25 M	230 M	55,42	91.305.000,00
Total				57,12	103.750.000,00

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa meskipun dua paket kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2011, namun kedua paket tersebut juga tidak dapat diselesaikan 100% pada waktu yang telah di tetapkan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu bulan Desember 2011. Kemudian tabel berikut merupakan gambaran pengelolaan program kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri tahun 2012, di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu sebagaimana terdapat pada tabel 1.6 dibawah ini:

Tabel 1.6
Realisasi Program kegiatan Tahun 2012

NO	Jenis Kegiatan	Volume	Realisasi	%	Anggaran
1	Pembangunan Pagar Kantor Desa	44.00 M	35.00 M	79,55	35.000.000,00
2	Semenisasi Jalan Bakul RT. 04	75x1.20x0.10 M	50,75 M	67,67	42.027.000,00
3	Pembangunan WC Posyandu RT.04	3.00x2.00 M		80,00	31.280.000,00
4	Pembuatan Badan Jalan	1400x2.00x0.80 M	916,00 M	65,43	42.000.000,00
Total				73,16	150.307.000,00

Sumber: BPMPD Kab. Indragiri Hilir

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, realisasi pencapaian target program kegiatan desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 tidak tercapai 100 %, sesuai target yang ditetapkan, hal ini dapat diduga disebabkan oleh kurang berfungsinya peran Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Melihat data dan kondisi faktual tersebut dapat diduga bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa, masih kurang efektif melaksanakan fungsinya sebagai

koordinator pembangunan di desa. Dimana Kepala Desa belum mampu menciptakan visi, komunikasi, motivasi, koordinasi, dan memberdayakan bawahan serta pengambilan keputusan yang cenderung di putuskan sendiri, artinya peran kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri belum sesuai dengan harapan, untuk membuktikan kebenarannya masih diperlukan analisis dan pengkajian lebih dalam, dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul;

“Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir”

B. Perumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diformulasikan masalahnya sebagai berikut.

Bagaimana peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan dan menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis (bagi peneliti) maupun lembaga dan kegunaan teoritis (bagi pengembangan ilmu pengetahuan)

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan jurusan dan program Manajemen Administrasi Publik.
- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- c. Menambah wawasan bagi para praktisi, tentang peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi bagi Kepala Desa agar meningkatkan kualifikasinya sebagai upaya meningkatkan profesionalisme sehingga dapat memberikan peran dan pelayanan yang lebih berkualitas.
- b. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi Kepala Desa, bagaimana meningkatkan peranannya dalam pembangunan yang dapat menumbuhkan kepuasan bagi masyarakat.
- c. Bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir, dan juga menambah ilmu pengetahuan, wawasan dalam melaksanakan tugas pada BPMPD..

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori.

A.1. Teori dan Konsep

Friedman mengemukakan bahwa peran adalah “serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal” (<http://www.sarjanaku.com>).

Peranan merupakan landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas, tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekarno (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, perilaku dan tujuan serta bagian dari tugas utama yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dari aktualisasi diri. Kemudian kalau dikaitkan dengan peranan kepala desa dapat dikatakan bahwa peran kepala desa disini merupakan pola sikap, perilaku dan tujuan serta bagian dari tugas utama yang diharapkan dari seseorang kepala desa berdasarkan posisinya sebagai pemimpin di desa untuk membawa masyarakat kepada tatanan kehidupan yang lebih baik.

A.2. Kepemimpinan.

A.2.1. Pengertian Kepemimpinan.

Istilah kepemimpinan berasal dari bahasa inggris *leadership* berasal dari kata dasar pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin, kata benda pemimpin artinya orang yang berfungsi memimpin, membimbing dan menuntun sedangkan kemampuan untuk memimpin disebut dengan kepemimpinan. Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan.

Terdapat banyak defenisi tentang kepemimpinan Wahjosumidjo, (1987: 25) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan. Artinya kepemimpinan adalah

kegiatan mempengaruhi orang lain. Sementara itu Isyandi (2004: 149) mengemukakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan dan mengarahkan orang-orang lain.

Pendapat senada dikemukakan oleh Silalahi (1999: 184) bahwa “Kepemimpinan diartikan sebagai aktivitas mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok agar melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu”.

Dirawat, dkk (1983: 23) juga mengemukakan:

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu dapat membantu pencapaian sesuatu maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

Selanjutnya Handoko (2000: 294) mengemukakan “Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya”. Nawawi (1996: 9) “Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terarah pada tujuan bersama. Robbins (2002: 163) menyatakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”.

Harold Koontz & Crill O'Donnell dalam Sutarto (2006: 147) mengatakan “*Leaderships is the art of inducing subordinates to accomplish their assignment with zeal and confidence*”. (Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan semangat keyakinan). Gunadi (2010: 2) mengatakan “Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mempengaruhi sekelompok orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama dan mengarahkan mereka agar mereka bersedia melakukan pekerjaan sesuai dengan pengarahannya”.

Sementara itu Kimball Young dalam Kartono (2010: 58) mendefinisikan “Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi, yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan akseptansi/penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus”.

Hellriegel & Slocum dalam Aditama (2002: 188) menyatakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut”.

Kemudian Yukl (2010: 4) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi”.

Safaria (2004: 3) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi diantara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Sedangkan Robbins (2002: 163) menyatakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”. Dengan demikian kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh

tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diambil pengertian bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahan untuk mencapai target atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

A.2.2. Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan menurut Nawawi (1996: 93) dibagi menjadi tiga, yakni: 1) tipe kepemimpinan otoriter; 2) tipe kepemimpinan *Laissez faire*; dan 3) tipe kepemimpinan demokratis.

1. Tipe kepemimpinan otoriter

Pada tipe kepemimpinan yang otoriter ini, semua kebijaksanaan atau "*policy*" dasar ditetapkan oleh pemimpin sendiri dan pelaksanaan selanjutnya ditugaskan kepada bawahannya. Semua perintah, pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa mengadakan konsultasi sebelumnya dengan orang-orang yang dipimpinnya.

2. Tipe kepemimpinan *Laissez faire*

Pada tipe ini pemimpin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap anggota staf di dalam tata prosedur dan apa yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan tugas-tugas jabatan mereka. Mereka mengambil keputusan-keputusan, penetapan prosedur-prosedur kerja, menetapkan dengan siapa ia hendak bekerja sama, pemimpin seolah-olah berada di luar kelompok, tanpa mau ikut serta, tanpa mau mencampuri, karena ia berpendapat bahwa masalah-masalah itu adalah hak sepenuhnya anggota staf kerjanya. Pemimpin mau turun tangan bilamana diminta oleh anggota staf.

3. Tipe kepemimpinan demokratis

Tipe ini merupakan tipe yang mempertemukan prinsip-prinsip dan prosedur kepemimpinan yang sangat kontras antara kedua tipe kepemimpinan yakni otoriter dan *Laissez faire*. Kepemimpinan yang demokratis mengambil manfaat peranan aktif dan menentukan bagi pemimpin yang sangat ditonjolkan dalam tipe otoriter, dan menarik manfaat sebesar-besarnya dari partisipasi aktif serta kebebasan anggota staf kerja yang sangat berlebihan pada tipe *Laissez faire*.

Lebih luas Nawawi dan Tohardi (2002: 303) membagi tipe kepemimpinan menjadi 5 (lima) tipologi, yakni 1) Tipe paternalistik 2) Type otokratis; 3) Type feodalistik; 4) Type milersistik; dan 5) Tipe kharismatik.

- a. Tipe paternalistik, yaitu tipe pemimpin yang menganggap dirinya sebagai orang tua (kebapakan). Tipe paternalistik ini dapat menggunakan gaya edukatif, naratif, motivatif, persuasif, inovatif dan refresif.
- b. Tipe otokratis, yaitu pemimpin yang menganggap bahwa kekuasaan itu berasal dari dirinya sendiri sehingga menganggap bahwa orang lain itu hanya ditakdirkan untuk dipimpin dan mengabdikan kepada dirinya. Gaya yang digunakan pada tipe ini adalah gaya refresif, gaya inspektif dan gaya investigatif.
- c. Tipe feodalistik, yaitu tipe pemimpin yang ingin dipuji oleh orang lain, untuk itu jika ia sukses memimpin bawahannya, maka ia yang akan mendapat pujian. Gaya yang digunakan adalah gaya inspektif, gaya inovatif, gaya persuasif dan gaya partisipatif.
- d. Tipe milersistik, yaitu pemimpin yang memiliki satu garis komando di dalam melaksanakan kegiatannya. Gaya yang digunakan adalah gaya instruktif, gaya inspektif dan gaya investigatif.
- e. Tipe kharismatik, yaitu pemimpin yang memiliki pengaruh luar biasa kepada bawahannya. Pemimpin yg kharismatik dinilai memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bawahan dan bahkan dibanding dengan pemimpin lain. Dengan demikian bawahan mudah mengikuti apa yang dikehendaki oleh seorang pemimpin yang kharismatik. Gaya yang digunakan adalah gaya persuasif, gaya motivatif, gaya edukatif, gaya inovatif, dan gaya partisipatif.

A.2.3. Teori-teori Kepemimpinan

Ada beberapa teori yang menyoroti munculnya seorang pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Menurut Tohardi (2002: 296) teori munculnya pemimpin ada lima, yakni: 1) Teori bakat; 2) Teori lingkungan; 3) Teori genetis; 4) Teori sosial; dan 5) Teori ekologis. Dengan rincian uraian sebagai berikut :

1. Teori bakat, menurut teori ini seseorang dapat menjadi pemimpin karena kemampuannya dalam mengembangkan bakat. Dalam pengembangan bakat tersebut tentunya sejalan dengan teori-teori kepemimpinan. Dengan demikian seorang yang mempunyai bakat memimpin, berarti mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin.
2. Teori lingkungan, menurut teori ini situasi dan kondisi lingkungan tertentu "mendesak" seseorang untuk dapat menjadi seorang pemimpin. Sehingga

pada saat lingkungan kurang menguntungkan dapat melahirkan seorang pemimpin pada kelompok di lingkungan tersebut.

3. Teori genetis, menurut teori ini tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Seorang pemimpin itu dilahirkan khusus untuk menjadi pemimpin. Contoh anak seorang raja, kelak juga akan menjadi raja, mewarisi tahta ayahnya.
4. Teori sosial, teori ini bertolak belakang dengan teori genetis. Menurut teori sosial, seseorang itu muncul menjadi seorang pemimpin disebabkan karena pengaruh sosial. Termasuk di dalam pengaruh sosial adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan serta menggali pengalaman. Semua itu terakumulasi sehingga membuat seorang menjadi piawai dalam memimpin.
5. Teori ekologis, teori ini merupakan penyempurnaan dari teori bakat dan teori sosial. Menurut teori ekologis, seseorang itu muncul menjadi pemimpin karena telah mengalir jiwa kepemimpinan di dalam tubuhnya (bakat), jiwa kepemimpinan yang sudah ada itu kemudian ditempa oleh lingkungan sosial yang kondusif, sehingga membuat seseorang menjadi piawai dalam memimpin.

Selain itu ada beberapa teori lain yang mengungkapkan munculnya seorang pemimpin. Menurut Thoha (2010: 32) mengungkapkan beberapa teori kepemimpinan yaitu:

1. Teori Sifat (Trait Theory).

Pada pendekatan teori sifat, analisa ilmiah tentang kepemimpinan dimulai dengan memusatkan perhatiannya pada pemimpin itu sendiri. Yaitu apakah sifat sifat yang membuat seseorang itu sebagai pemimpin. Dalam teori sifat, penekanan lebih pada sifat-sifat umum yang dimiliki pemimpin, yaitu sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Teori ini mendapat kritikan dari aliran perilaku yang menyatakan bahwa pemimpin dapat dicapai lewat pendidikan dan pengalaman. Sehubungan dengan hal tersebut Keith Davis dalam Thoha (2010: 33) merumuskan empat sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu;

- a. Kecerdasan, hasil penelitian pada umumnya membuktikan bahwa kepemimpinan mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.
- b. Kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai perhatian emosi yang stabil, karena mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas aktivitas sosial. Dia mempunyai keinginan dihargai dan menghargai.
- c. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Para pemimpin secara relatif mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka bekerja berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari yang ekstrinsik.

- d. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan para pengikutnya dan mau berpihak kepadanya.

2. Teori Situasional dan Model Kontingensi.

Dalam model Kontingensi memfokuskan pentingnya situasi dalam menetapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga model tersebut berdasarkan kepada situasi untuk efektivitas kepemimpinan. Menurut Fred Fiedler, kepemimpinan yang berhasil terhadap situasi tertentu. Sehingga suatu gaya kepemimpinan terhadap situasi tertentu akan efektif apabila gaya kepemimpinan tersebut digunakan dalam situasi yang tepat.

Sehubungan dengan hal tersebut Fiedler dalam Thoha (2010: 36)

mengelompokan gaya kepemimpinan sebagai berikut:

- a. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada orang (hubungan), dalam gaya ini pemimpin akan mendapatkan kepuasan apabila terjadi hubungan yang mapan diantara sesama anggota kelompok dalam suatu pekerjaan. Pemimpin menekankan hubungan pemimpin dengan bawahan atau anggota sebagai teman sekerja.
- b. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Dengan gaya ini pemimpin akan merasa puas apabila mampu menyelesaikan tugas-tugas yang ada padanya. Sehingga tidak memperhatikan hubungan yang harmonis dengan bawahan atau anggota, tetapi lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas sebagai prioritas yang utama.

3. Teori Jalan Kecil – Tujuan (*Path -Goal Theory*).

Dalam teori Jalan Kecil-Tujuan berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan dan pelaksanaan pekerjaan bawahan atau anggotanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Robert House dalam Thoha (2010: 42) memasukkan empat gaya utama kepemimpinan dalam Path-Goal Theory sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan direktif, Gaya ini menganggap bawahan atau senyatanya apa yang diharapkan dari pimpinan dan pengarahan yang khusus diberikan oleh pimpinan. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari bawahan atau anggota.

- b. Kepemimpinan yang mendukung. Gaya ini memimpin mempunyai kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni terhadap bawahan atau anggotanya.
- c. Kepemimpinan Partisipatif. Gaya kepemimpinan ini, pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-saran dari para bawahannya, namun pengambilan keputusan masih tetap berada padanya.
- d. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Gaya kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para bawahannya untuk berprestasi. Demikian juga pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik.

4. Teori Kepemimpinan Situasional Hershey dan Blanchard.

Kepemimpinan Situasional menurut Paul Hershey dan Blanchard dalam Sutarto (2006: 22) mengatakan *Leadership is the process of influencing the activities of an individual or a group in effort to ward goal achievement in a given situation.* (Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu).

Hershey dan Blanchard dalam Robbins dan Coulter (2007: 187) mengatakan bahwa:

Penekanan pada pengikut untuk memperoleh keefektifan kepemimpinan mencerminkan kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima atau menolak pemimpinnya. Tanpa melihat apa yang dilakukan pemimpinnya, keefektifan tergantung kepada tindakan pengikutnya. Itu merupakan dimensi penting yang sedang ditekankan dalam kebanyakan teori kepemimpinan. Kesiapan yang didefinisikan oleh Hershey dan Blanchard mengacu kepada sejauh mana orang mampu dan bersedia melaksanakan tugas tertentu.

Selanjutnya Kepemimpinan situasional menurut Hershey dan Blanchard dalam Thoah, (2010: 63) didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut :

- a. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan.
Perilaku pengarahan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya

bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikut.

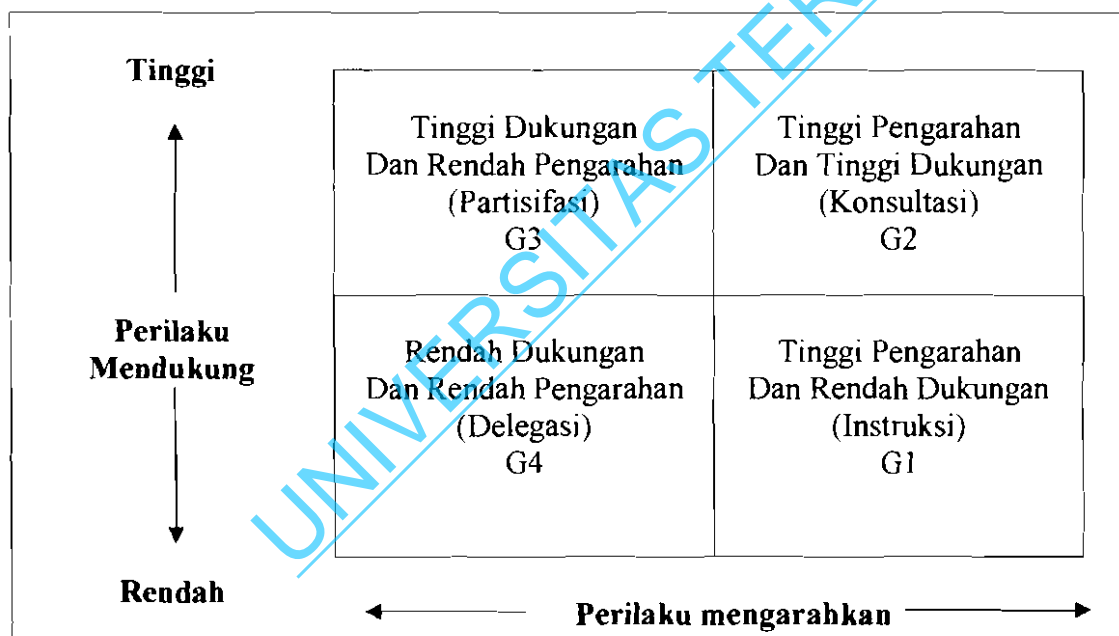
b. Jumlah dukungan yang diberikan oleh pimpinan.

Perilaku pendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam mengambil keputusan.

Kedua poros tersebut ditempatkan pada dua poros terpisah dan berbeda, sehingga dengan demikian dapat diketahui empat gaya dasar kepemimpinan sebagaimana gambar 2.1.dibawah ini:

Gambar: 2.1

Model Empat Dasar Gaya Kepemimpinan Situasional Hersey – Blanchard



Sumber : Miftah Thoha, (2010: 65)

Gaya 1(G1), Seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak memberikan pengarahan namun sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi pengikutnya, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka.

Gaya 2 (G2). Seorang Pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya ini mau
 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin dalam gaya ini masih tetap harus memberikan pengawasan dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas tugas pengikutnya.

Gaya 3 (G3). Prilaku pemimpin menekankan pada banyak memberikan dukungan namun sedikit dalam pengarahan. Dalam gaya seperti ini pemimpin menyusun keputusan bersama sama dengan para pengikutnya dan mendukung usaha usaha mereka dalam menyelesaikan tugas.

Gaya 4 (G4). Pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya ini mendelegasikan keputusan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada pengikutnya. Tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut yang ditujukan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi tujuan tertentu. Kematangan dalam kepemimpinan situasional dapat dirumuskan sebagai suatu kemampuan dan kemauan dari orang orang untuk bertanggung jawab dalam mengarahkan perilakunya sendiri. Kemampuan yang merupakan salah satu unsur dalam kematangan , berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan atau dari pengalaman.

Dari beberapa gaya kepemimpinan yang dikemukakan diatas, yang sesuai dengan kepemimpinan kepala Desa menurut penulis adalah Gaya 2 (G2), dimana peran pemimpin disini harus mampu memanfaatkan situasi dalam kepemimpinannya, dan dapat melibatkan dirinya berkomunikasi satu dan dua arah, artinya pemimpin mampu memberikan arahan kepada bawahan atau pengikutnya dan mengawasinya secara ketat, kemudian memberikan dukungan dan motivasi serta melibatkan pengikut dalam mengambil keputusan. Selanjutnya penekanan pada pengikut untuk memperoleh Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keefektifan kepemimpinan mencerminkan kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima atau menolak pemimpinnya.

Selanjutnya ada empat tingkat kematangan menurut Hershey dan Blanchard dalam Thoha (2010: 66) yang dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut ini;

Gambar: 2.2.
Empat Tingkat Kematangan Para Pengikut Hershey dan Blanchard

Mampu dan Mau	Mampu Tetapi Tidak Mau atau Kurang Yakin	Tidak Mampu Tetapi Mau	Tidak Mampu dan Tetapi Mau atau Tidak Yakin
M4	M3	M2	M1

Sumber : Miftah Thoha, (201: 66)

Gambar: 2.2. menggambarkan hubungan antara tingkat kematangan para pengikut atau bawahan dengan gaya kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan ketika para pengikut bergerak dari kematangan yang sedang ke kematangan yang telah berkembang (dari M1 sampai dengan M4).

Ada empat dasar perilaku kepemimpinan dalam pengambilan keputusan pada berbagai situasi tersebut menurut Hershey dan Blanchard dalam Thoha,(2010: 67) sebagai berikut :

1. Intruksi.

Gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Pemimpin memberikan batasan peranan pengikutnya dan memberi tahu mereka tentang apa, bagaimana, bilamana dan dimana melaksanakan berbagai tugas. Inisiatif pemecahan masalah dan pembuatan keputusan semata mata dilakukan oleh pemimpin. Pemecahan masalah dan keputusan diumumkan dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemimpin. Perilaku pemimpin ini digunakan untuk situasi G1 dan M2

2. Konsultasi

Pada gaya ini pemimpin masih banyak memberikan pengarahan dan masih membuat hampir sama dengan keputusan, tetapi hal ini diikuti dengan meningkatkan banyaknya komunikasi dua arah dan perilaku mendukung, dengan berusaha mendengar perasaan pengikut tentang keputusan yang dibuat, serta ide ide dan saran saran mereka. Meskipun dukungan ditingkatkan, pengendalian atas pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Perilaku pemimpin ini digunakan untuk situasi G2 dan M2

3. Partisipasi

Dengan gaya ini, pemimpin dan pengikut saling tukar menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, Komunikasi dua arah ditingkatkan, dan peranan pemimpin adalah aktif mendengar. Tanggung jawab pemecahan masalah dan pembuatan keputusan sebagian besar berada ada pihak pengikut. Hal ini sudah sewajarnya karena pengikut mempunyai kemampuan melaksanakan tugas. Perilaku pemimpin ini digunakan untuk situasi G3 dan M3.

4. Delegasi.

Pada gaya ini bawahanlah yang memiliki kontrol untuk memutuskan tentang bagaimana cara pelaksanaan tugas. Pemimpin memberikan kesempatan yang luas bagi bawahan untuk melaksanakan petunjuk mereka sendiri karena mereka memiliki kemampuan dan keyakinan untuk memikul tanggung jawab dalam pengarahan perilaku mereka sendiri. Perilaku pemimpin ini digunakan untuk situasi G4 dan M4.

A.2.4. Syarat-syarat Pemimpin.

Seorang pemimpin harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Burhanuddin (1994: 78) yang menjelaskan syarat-syarat pemimpin sebagai berikut:

1. *Personality*, artinya seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik. Melalui sifat-sifat kepribadiannya tersebut, seseorang dapat memperoleh pengakuan dari orang lain dan jadi penentu keberhasilan kepemimpinannya.
2. *Purpose*, artinya seorang pemimpin harus memiliki konsep tujuan yang jelas, apa yang ingin dicapainya. Jika seorang pemimpin tidak memiliki tujuan, maka kepemimpinannya akan tergolong lemah dan penuh keraguan. Merumuskan tujuan mempunyai peran mutlak dalam suatu organisasi.
3. *Knowledge*, artinya seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang organisasi yang dipimpinnya. Suatu kelompok akan menaruh kepercayaan pada pemimpinnya apabila pemimpinnya memiliki pengetahuan yang luas dan mampu memberikan keputusan-keputusan yang tepat.

4. *Professional skills*, artinya seorang pemimpin harus memiliki keterampilan-keterampilan profesional guna mengarahkan bawahannya dalam mengelola organisasi yang dipimpinnya.

A.2.5. Sifat-sifat Pemimpin

Selain sejumlah persyaratan yang dikemukakan oleh Burhanuddin tersebut, ada sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin, diantaranya menurut Tohardi (2002: 298) yang menyatakan sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin antara lain: 1) tekun; 2) giat; 3) keras hati; 4) bercita-cita; 5) kuat; 6) berani; 7) kerjasama; 8) percaya diri; 9) penuh daya khayal; 10) berakhlak; 11) lapang dada; dan 12) tidak mementingkan diri sendiri.

Kemudian Kartono (2010: 43-47) menyatakan bahwa upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu antara lain dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas/mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Usaha-usaha yang sistematis tersebut membuahkan teori yang disebut sebagai *the traitist theory of leadership* (teori sifat/kesifatan dari kepemimpinan), diantara penganut teori ini adalah Ordway Tead dan George R. Terry.

Dalam teori itu dikemukakan 10 sifat kepemimpinan yaitu sebagai berikut :

1. Energi jasmaniah dan mental (*physical and nervous energy*).
2. Kesadaran akan tujuan dan arah (*A sense of purpose and direction*).
3. Antusiasme (*enthusiasm*; semangat, kegairahan, kegembiraan yang besar).
4. Keramahan dan kecintaan (*Friendliness and affection*).
5. *Integritas* (*integrity*, keutuhan, kejujuran, ketulusan hati).
6. Penguasaan teknis (*technical mastery*).
7. Ketegasan dalam mengambil keputusan (*decisiveness*).
8. Kecerdasan (*intelligence*).
9. Keterampilan mengajar (*teaching skill*).
10. Kepercayaan (*faith*).

A.2.6. Fungsi dan peran Kepemimpinan.

A.2.6.1. Fungsi Kepemimpinan.

Stoner dalam Pasolong (2013: 22), mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah agar seseorang beroperasi secara efektif, kelompok memerlukan seseorang untuk melakukan dua fungsi utama, yaitu; (1) Berhubungan dengan tugas atau memecahkan masalah, (2) Memelihara kelompok atau sosial, yaitu tindakan seperti menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa individu merasa dihargai oleh kelompok.

Selanjutnya menurut Adair masih dalam Pasolong (2013: 22) mengatakan, bahwa fungsi kepemimpinan, yaitu; (1) perencana, (2) Pemrakarsaan, (3) pengendalian, (4) pendukung, (5) penginformasian, dan (6) pengevaluasian.

A.2.6.2. Peran Kepemimpinan.

Pemimpin berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Kepala desa merupakan bagian dari pemimpin birokrasi yang perannya sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pasolong (2013: 33) menjelaskan peran pemimpin birokrasi sebagai berikut:

1. Peran Pengambil Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.
2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.
3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah

kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan.

4. Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya.
5. Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya.

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Pasolong (2013: 33), dimana upaya untuk menilai sukses atau gagalnya pemimpin itu dalam hal ini kepemimpinan kepala desa, antara lain dilakukan dengan mengamati dan melihat bagaimana perannya dalam pemberdayaan desa menuju desa mandiri, apakah perannya sebagai pengambil keputusan, mempengaruhi bawahan atau mitra kerja, memotivasi, peran antar pribadi dan peran informasional sudah berfungsi sebagaimana mestinya.

Kemudian penelitian ini juga berpedoman pada teori kepemimpinan situasional Hershey dan Blanchard. Kepemimpinan Situasional menurut Paul Hershey dan Blanchard adalah *Leadership is the process of influencing the activities of an individual or a group in effort to ward goal achievement in a given situation* (Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu).

Hershey dan Blanchard dalam Robbins dan Coulter (2007: 187) mengatakan bahwa, penekanan pada pengikut untuk memperoleh keefektifan kepemimpinan

mencerminkan kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima atau menolak pemimpinnya. Tanpa melihat apa yang dilakukan pemimpinnya, keefektifan tergantung kepada tindakan pengikutnya. Itu merupakan dimensi penting yang sedang ditekankan dalam kebanyakan teori kepemimpinan. Kesiapan yang didefinisikan oleh Hershey dan Blanchard mengacu kepada sejauh mana orang mampu dan bersedia melaksanakan tugas tertentu.

Kepemimpinan situasional menurut Hershey dan Blanchard didasarkan pada saling berhubungannya hal-hal berikut :

a) Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan.

Perilaku pengarahan dapat dirumuskan sebagai sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan komunikasi satu arah ini antara lain, menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan pengikut, memberitahukan pengikut tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana melakukan hal tersebut, bagaimana melakukannya dan melakukan pengawasan secara ketat kepada pengikut.

b) Jumlah dukungan yang diberikan oleh pimpinan.

Perilaku pendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan interaksi, dan melibatkan para pengikut dalam mengambil keputusan.

Alasan peneliti mengambil teori situasional Hershey dan Blanchard sebagai dasar dan acuan dalam penelitian ini adalah, karena peneliti melihat peran pemimpin disini harus mampu memanfaatkan situasi dalam kepemimpinannya, dan dapat melibatkan dirinya berkomunikasi satu dan dua arah, artinya pemimpin mampu memberikan

arahan kepada bawahan atau pengikutnya dan mengawasinya secara ketat, kemudian memberikan dukungan dan motivasi serta melibatkan pengikut dalam mengambil keputusan. Selanjutnya penekanan pada pengikut untuk memperoleh keefektifan kepemimpinan mencerminkan kenyataan bahwa para pengikutlah yang menerima atau menolak pemimpinnya.

A.3. Tinjauan umum tentang Desa dan Kepala Desa.

A.3.1. Pengertian Desa dan Lembaga Desa.

Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pasal 1 butir 5 menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada butir 6 dikatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Butir 7 dikatakan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Butir 8 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Selanjutnya pada butir 9 disebutkan Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

A.3.2. Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

Yang menjadi wewenang Kepala desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A.3.3. Kewajiban Kepala Desa.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkunganhidup

Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD. Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD.

A.4. Pemberdayaan.

A.4.1. Pengertian Pemberdayaan.

Istilah “pemberdayaan” diambil dari Bahasa Inggris “empowerment” yang berasal kata dasar “power” berarti kekuatan atau daya. Yudianto (1996: 79) mengartikan daya itu sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak yang menyebabkan sesuatu itu bergerak. Dalam Bahasa Indonesia empowerment diterjemahkan sebagai pemberdayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihak-pihak yang kurang atau tidak berdaya.

Sekilas, makna pemberdayaan memiliki makna luas dari beberapa sudut pandang. Agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya (Maharani: 2013)

Payne dalam Adi (2008: 77-78) menjelaskan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) pada hakekatnya adalah; *"To help clients power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence use power and by transferring power from the environment to clients."* (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui tranfer daya dari lingkungannya).

Kemudian Shardlow dalam Adi (2008: 78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Sardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai suatu gagasan.

Dari beberapa pengertian empowerment atau pemberdayaan diatas, secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan

kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat.

A.4.2. Tujuan Pemberdayaan.

Sulistiyani (2004) dalam Maharani (2013) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Kemudian Hogan dalam Adi (2008: 85) melihat pemberdayaan sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang masa, di mana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Dari konteks kesejahteraan sosial upaya pemberdayaan yang digambarkan oleh Hogan diatas tujuannya juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dari suatu tingkatan ketingkatan yang lebih baik.

A.5. Program Desa Mandiri.

A.5.1. Pengertian Program Desa Mandiri.

Program desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2010, adalah Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat pedesaan yang makmur, mandiri dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang tahun 2025.

A.5.2. Prinsip Dasar Program.

Dalam pasal 2 Peraturan Bupati Indragiri Hilir nomor 09 tahun 2010 dijelaskan bahwa, yang menjadi prinsip dasar kebijakan program desa mandiri adalah:

1. Memberikan kewenangan kepada pemerintahan desa secara lebih luas untuk percepatan pembangunan desa.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek pembangunan.
3. Pemerataan pengalokasian dan kegiatan pembangunan keseluruh desa/ke lurahan di daerah.
4. Menciptakan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

A.5.3. Indikator Keberhasilan Program.

Keberhasilan pelaksanaan program desa mandiri di desa/kelurahan ditentukan oleh indikator sebagai berikut :

1. Kualitas hasil pelaksanaan program desa mandiri sesuai dengan rancangan teknis.
2. Adanya over pretasi pekerjaan.
3. Tergalinya potensi swadaya masyarakat dan meningkatnya semangat gotong royong dalam pelaksanaannya.

4. Pengelola kegiatan mampu menyelesaikan segala administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan program desa mandiri secara tepat waktu.
5. Lembaga pemerintahan desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan mampu bersinergi dan satu persepsi dalam menyikapi dan melaksanakan program desa mandiri.

A.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Model penelitian ini juga dibangun berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

1. M. Aries Djaenuri (2011), dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tambun. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan kepala desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan nilai pengaruh sebesar 28,339 %.
2. Ririn Paryuliastuti (2003), Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan fisik di desa jogorogo masih kurang berhasil, hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan gotong royong dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab terhadap hasil pembangunan fisik yang dicapai belum maksimal. Selanjutnya dari faktor pendidikan mayoritas masyarakat desa jogorogo tingkat pendidikan hanya tamat SD.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyono, "Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Mandiri Pangan Di Desa Muntuk Kabupaten Bantul".

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Hasil penelitian yang dilakukannya, bahwa Desa Muntuk merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul, merupakan desa rawan pangan dengan jumlah KK miskin yang cukup besar. Dengan program desa mandiri pangan di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul sebagai suatu upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat terkesan kecil, baik dari sisi cakupan kegiatan maupun besaran dana yang diimplementasikan, namun program desa mandiri pangan ini sangat strategis karena merupakan upaya pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di lokasi desa yang mengalami masalah rawan pangan untuk dapat memotivasi dalam berusaha menciptakan pendapatan bagi keluarga.

Program pemberdayaan masyarakat seperti yang ada di program desa mandiri pangan ini merupakan salah satu program pemberdayaan yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari sistem dan pengelolaan kelompok dampingan. Desa mandiri pangan sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat telah berhasil mendudukkan pemberdayaan sesuai dengan tempatnya dan porsinya. Tepat dimaksudkan adalah program bekerja sesuai porsinya sebagai pemberdaya (bukan memberdayai). Program desa mandiri pangan adalah program yang terkonsentrasi ke dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan aspek pendapatan/ekonomi dan sosial yang mana dari aspek-aspek dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan karena saling dukung dan berhubungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Husinsyah dengan judul; Dampak Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat di Desa Birang

Kec. Gunung Tabur Kabupaten Berau, Jurnal EPP. Vol.6.No.2.2009. 16-25, Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman. Berdasarkan hasil penelitian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dampak program desa mandiri pangan terhadap tingkat ketahanan pangan masyarakat di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau sangat kuat sebesar 82%, sedangkan sisanya 18% dipengaruhi oleh faktor lain. Kegiatan program desa mandiri pangan yang telah efektif dilaksanakan adalah pelatihan, penguatan modal, sarana dan prasarana, dan teknologi.
- b. Ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pelaksanaan program desa mandiri pangan, dimana rata-rata pendapatan petani sebelum program sebesar Rp.4.049.673,41 sedangkan sesudah sebesar Rp.6.990.689,66.

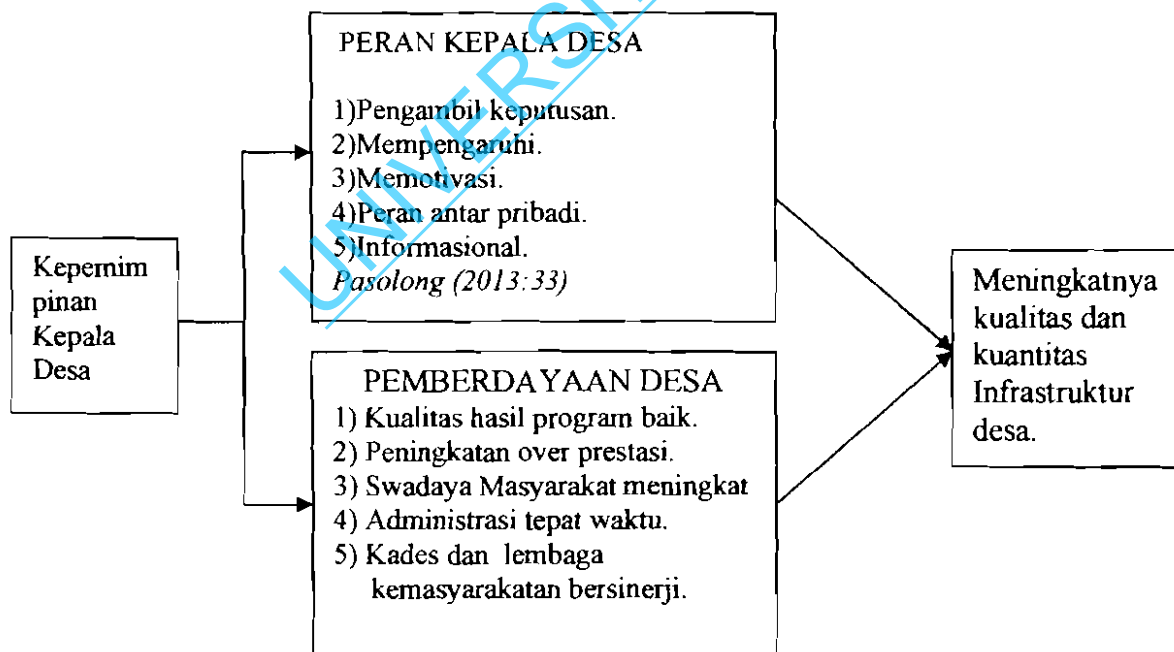
Dari kedua penelitian terdahulu yang diteliti oleh Agus Mulyono dan Husinsyah diketahui terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri, sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu menyoroti pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh yang berdampak terhadap ketahanan pangan masyarakat, sedangkan penulis lebih melihat dari peranan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri yang dampaknya pada hasil program desa mandiri itu sendiri yaitu infrastruktur desa.

B. Kerangka Berpikir.

Berdasarkan teori yang dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan kerangka pemikiran bahwa peranan kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri sesuai dengan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta wewenang yang dimiliki sehingga kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan desa dengan baik baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pikirnya sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Pikir



Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dibuat hubungan sebagai berikut:

- a. Kepala desa mempunyai peranan mengambil keputusan, mempengaruhi, memotivasi, memainkan peran antar pribadi dan informasional.
- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepala desa berkewajiban menyelenggarakan pembangunan diantaranya pemberdayaan desa.
- c. Terlaksananya pemberdayaan desa dengan baik akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur desa.

C. Defenisi Operasional.

Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat didefinisikan Kepemimpinan Kepala Desa adalah kemampuan yang dimiliki seorang Kepala Desa untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemimpin berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Kepala Desa merupakan bagian dari pemimpin birokrasi yang perannya sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pasolong (2013: 33) menjelaskan peran pemimpin birokrasi, yang dapat dijadikan sebagai Indikator Peranan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Peran Pengambil Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan

apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.

2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.
3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan.
4. Peran antar pribadi, yaitu peran strategis pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya.
5. Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Menurut Sugiyono (2009: 13) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif’.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Ilmu Manajemen yang memfokuskan pada bidang Manajemen Administrasi Publik. Secara lebih khusus pada aspek peranan kepemimpinan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan menuju desa mandiri (*Studi kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Camat Tembilahan Hulu selaku pembina dan koordinator pelaksana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut:

- Camat Tembilahan Hulu : H.M. Yusuf N.
- Sekretaris desa : Ratnawati
- Kaur Pembangunan : Syahdan Z.

- Kaur Pemerintahan : Herman
- Kaur Umum : Arbain NP
- Ketua BPD : Abu Ma'ah
- Sekretaris BPD : H. Hasyim Umar
- Bendahara BPD : Darmawan
- Ketua LPM : Ardiasnsyah
- Sekretaris LPM : M. Aini
- Bendahara LPM : Undul
- Kepala Dusun : Ardani
- Ketua RW I : A. Rahman Sidik
- Ketua RW II : Jadri
- Kepala Dusun IV : Tamrin
- Ketua RT. 01 RW I : Ratmir
- Ketua RT. 02 RW I : Mismar
- Ketua RT. 03 RW I : Mukhtar
- Ketua RT. 04 RW II : Syafrudin
- Ketua RT. 05 RW II : Ajiman
- Ketua Pokja I : Syamsudin
- Ketua Pokja II : Abdul Hamid
- Ketua Pokja III : Kaspul
- Ketua Pokja IV : Amirudin
- Ketua Pokja V : Sulaiman

C. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara; dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Observasi; dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan.
3. Mengumpulkan data, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode analisis data.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Melalui teknik ini akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai. Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni menganalisa dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa/diteliti dalam penelitian, yaitu mengenai dampak program pemberdayaan desa menuju desa mandiri terhadap pembangunan di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Penilaian data dilakukan berdasarkan prinsip validitas, obyektifitas, reabilitas melalui cara mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan kritik atas data yang telah dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu data, fakta dan informasi yang

telah dikumpulkan disederhanakan, kemudian diinterpretasikan secara berurutan (Anas Sudijono, 2004:43).

C. Tahapan Penelitian.

Tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui beberapa cara, diantaranya menyusun operasional variabel penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Singarimbun (2003: 46-47) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara kerja suatu variabel. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan guna untuk mendapatkan jawaban terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Selanjutnya jawaban yang diberikan oleh informan dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan. Setelah itu kesimpulan yang diambil dikaitkan dengan dampak program pemberdayaan desa menuju desa mandiri terhadap pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

A.1. Keadaan Geografis

A.1.1. Letak dan luas wilayah

Desa Pekan Kamis merupakan salah satu dari tiga desa dan dua kelurahan yang terdapat di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun desa dan kelurahan lainnya itu adalah Desa Pulau Palas, Desa Sialang Panjang, Kelurahan Tembilahan Hulu, dan Kelurahan Tembilahan Barat. Untuk mengetahui secara jelas letak geografis Desa Pekan Kamis, maka disajikan batas-batas desa sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Batang Tuaka.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tembilahan Barat.

Sebelah Timur berbatas dengan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan.

Sebelah Barat berbatas dengan Sialang Panjang.

Luas wilayah desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu adalah 3,2 Km², yang terdiri dari satu dusun, dua RW dan lima RT yaitu:

1. RW I terdiri dari 3 RT
2. RW II terdiri dari 2 RT

A.1.2. Keadaan Alam dan Iklim

Tipologi desa Pekan Kamis adalah dataran rendah, sebagaimana Kabupaten Indragiri Hilir umumnya. Keadaan tanah di desa Pekan Kamis merupakan tanah gambut yang cukup subur, hal ini terlihat dari sebagian besar

masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Di desa Pekan Kamis terdapat dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau, sebagaimana umumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Desa ini memiliki ketinggian tanah di atas permukaan laut, antara 0 - 1 meter, dan memiliki curah hujan 50-60 Mm yang berlangsung lebih kurang 4 bulan dalam setahun. Adapun suhu rata-rata di desa Pekan Kamis antara 28°C - 32°C.

A.2. Keadaan Demografi

A.2.1. Jumlah Penduduk

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat desa pada tahun 2012, menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa Pekan Kamis adalah 1.182 jiwa, terdiri dari :

Jumlah penduduk laki-laki	: 604 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	: 578 jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 310 KK
Jumlah kepala keluarga miskin	: 73 KK

A.2.2. Agama

Mayoritas penduduk desa Pekan Kamis adalah pemeluk agama islam. Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yang beragama islam yakni sebesar 100%. Dikarenakan masyarakat desa Pekan Kamis memeluk agama islam maka jumlah sarana peribadatan yang ada di desa Pekan Kamis berjumlah 1 buah mesjid dan 4 buah mushalla, yaitu sebagai berikut:

1. RW I, RT 01 terdapat 1 Masjid
2. RW I, RT 02 terdapat 1 Mushalla
3. RW I, RT 03 terdapat 1 Mushalla
4. RW II, RT 04 terdapat 1 Mushalla
5. RW II, RT 05 terdapat 1 Mushalla

A.2.3. Sumber Mata Pencaharian

Desa Pekan Kamis adalah wilayah dataran rendah yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dari sektor pertanian, dan sebagian kecil bekerja pada sektor lainnya. Bertani kelapa merupakan mata pencaharian pokok masyarakat desa Pekan Kamis pada umumnya, dimana kelapa merupakan komoditi andalan untuk desa ini. Selain bertani kelapa, sebagian masyarakat bekerja mengolah tanaman padi dan sayuran. Adapun lahan yang dikelola oleh masyarakat adalah, perkebunan kelapa lebih kurang 350 Ha, pinang 25 Ha, lahan pertanian padi 175 Ha, dan sayuran sekitar 3 Ha.

A.2.4. Pendidikan

Di desa Pekan Kamis terdapat 1 Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar 1 buah, dan Mts 1 buah. Dari segi pendidikan, penduduk desa Pekan Kamis bisa dikatakan masih rendah, dimana sebahagian besar penduduknya hanya tamatan SMP. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya yang kebanyakan hanya tamatan SMP, hal ini dapat dikatakan masyarakat desa Pekan Kamis masih kurang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.

A.2.5 Kesehatan

Secara umum kondisi kesehatan di desa Pekan Kamis sudah terbilang cukup baik, hal ini dikarenakan sudah tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, antara lain:

1. Posyandu : 2 unit
2. Bidan Desa : 1 orang
3. Pustu : 1 unit

A.2.6. Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat desa Pekan Kamis merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup masyarakatnya sangat erat, dan dibarengi dengan semangat gotong royong yang sangat kuat. Masyarakat desa Pekan Kamis terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat, diantaranya suku Banjar, Bugis, Melayu, jawa dan lain sebagainya. Meskipun berbeda suku dan adat istiadat, dalam keseharian mereka selalu hidup rukun dan damai, dengan menjunjung tinggi jiwa kebersamaan.

B. Organisasi pelaksana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

B.1. Tingkat Kabupaten

B.1.1. Penanggung jawab program

Bupati Indragiri Hilir dan Wakil Bupati Indragiri Hilir sebagai penanggung jawab terhadap kebijakan program pemberdayaan desa dalam rangka otonomi menuju desa mandiri

B.1.2. Tim Koordinasi.

Tim koordinasi otonomi desa terdiri dari Kepala Badan / Dinas / Kantor yang terkait dengan kegiatan dilapangan yang diketuai oleh Kepala Bappeda.

Tugas Tim Koordinasi adalah :

- a. Merumuskan rancangan peraturan daerah/bupati yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada desa
- b. Merumuskan Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Otonomi Desa.
- c. Menginventarisir kemungkinan kewenangan yang akan diserahkan kepada desa.
- d. Melakukan pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan otonomi desa.
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala dalam pelaksana otonomi desa.

B.1.3. Tim Fasilitasi dan Verifikasi

Anggota Tim Fasilitasi ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan personil yang dianggap mampu dan memahami tentang otonomi yang direkrut dari personil Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang relevan dengan otonomi desa.

Tim Fasilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun Draft Petunjuk Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Otonomi Desa.

- b. Melakukan sosialisasi Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri.
- c. Melakukan verifikasi terhadap rancangan APBDesa beserta DPA
- d. Melakukan pertemuan bulanan tingkat kabupaten dengan Konsultan Manajemen dan FK guna membahas perkembangan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi bersama Tim Koordinasi dan Sekretariat Program Pemberdayaan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
- f. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri.

B.1.4. Sekretariat (BPMPD)

Sekretariat Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi Menuju Desa Mandiri berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir dengan tugas :

- a. Menyusun Draft Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi.
- b. Melakukan sosialisasi / penjelasan teknis Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Otonomi bersama Tim Fasilitasi dan Tim Koordinasi.
- c. Mempersiapkan pertemuan/rapat bulanan dan rapat koordinasi
- d. Menunjang tugas Tim Fasilitasi dan Tim Koordinasi
- e. Melaksanakan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri.

- f. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi kepada perangkat desa dalam pengelolaan kegiatan di desa.
- g. Menyiapkan rekomendasi permintaan penyaluran dana dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa.
- h. Melakukan pemantauan dan monitoring bersama Tim Fasilitasi dan Tim Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan otonomi desa.

B.2. Tingkat Kecamatan.

Camat adalah pembina dan koordinator pemberdayaan desa menuju desa mandiri, mempunyai tugas adalah :

- a. Membentuk Tim Koordinasi dan Pembina Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Kasi PMD, Forum LPM Kecamatan dan UPTD yang berkompeten.
- b. Membantu Tim Kabupaten mensosialisasikan program pemberdayaan desa di Kecamatan.
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Indragiri Hilir setiap bulan melalui BPMPD.
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang dihadapi desa dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
- e. Melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.
- f. Melegitimasi bobot atau progress pelaksanaan fisik dilapangan
- g. Melegitimasi hasil musyawarah penetapan prioritas kegiatan.
- h. Melaksanakan sosialisasi di tingkat desa.

- i. Pihak kecamatan harus mengukuhkan BPD yang baru terbentuk paling lambat 2 bulan setelah pembentukan.
- j. Bertanggung jawab terhadap pemberian rekomendasi pencairan dana.
- k. Camat berkewenangan memanggil dan menegur Fasilitator Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan program otonomi desa.
- l. Camat melalui Kasi PMD membantu, memfasilitasi pembuatan dan penyelesaian administrasi kegiatan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan program otonomi desa.

B.3. Tingkat Desa.

B.3.1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menyusun APBDesa, bersama perangkat desa, BPD dan LPM.
- b. Merumuskan penggunaan dana operasional atau anggaran tidak langsung.
- c. Pengarah forum musyawarah tingkat Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian dan pemeliharaan kegiatan.
- d. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten.

- f. Mengkonsultasikan dengan segera kepada Camat dan BPMPD apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkembang berkenaan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa.

Di samping kewenangan guna suksesnya Pelaksanaan Pemberdayaan

Desa menuju desa mandiri, Kepala Desa bertugas :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menunjuk dan mengangkat bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- f. Kades harus membuat pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui BPD, berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di desa (LKPJ)
- g. Menandatangani dokumen permintaan dana dan SPJ
- h. Melaksanakan atau menjalankan ketetapan peraturan desa dan keputusan desa.
- i. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- j. Wajib memberdayakan Lembaga yang ada di Desa.

B.3.2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa

(PTPKD) bertanggung jawab kepada Kepala Desa mempunyai tugas dan

fungsi yaitu :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ABPDesa
- b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa
- c. Menyusun Raperdes ABPDesa, perubahan APBDesa dan bertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
- d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa, tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- e. Bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan di desa.
- f. Bersama LPM Mengkoordinasikan kegiatan dilapangan.
- g. Mengelola administrasi dan keuangan desa
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa yang dibantu oleh Bendahara Desa.
- i. Membuat dokumen persyaratan permintaan pencairan dana
- j. Melakukan penarikan dana dari rekening desa (PTPKD) bersama kepala desa.
- k. Mengatur dan mengkoordinasikan pengadaan material yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
- l. Menyerahkan dana desa kepada bendahara untuk menyimpan, membayar dan membuat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan dana.

B.3.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Tugas Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

- a. Mensosialisasikan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka

- b. Mensukseskan Program Pemberdayaan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi bersama Kades dan LPM serta memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa setelah dibahas bersama-sama dalam musyawarah di Desa.
- d. Bersama Kades, LPM dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana kegiatan.
- e. Membawakan ke forum musyawarah atas adanya dugaan penyimpangan dana dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Melaporkan dan mengkonsultasikan kepada Camat apabila ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di desa, selanjutnya ke kabupaten.
- g. Bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, LPM, menginventarisasi dan menghimpun potensi sumber pendapatan desa.
- h. Memantau pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa.
- i. Bersama Kepala Desa sebagai pengarah forum musyawarah tingkat Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan.
- j. Mengetahui laporan kemajuan fisik/progres kegiatan dilapangan
- k. BPD selaku Lembaga Pemerintahan Desa tidak dibenarkan membawakan permasalahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa kepada pihak ketiga sebelum permasalahan tersebut diselesaikan secara

intern dengan perangkat desa, Camat dan pihak Kabupaten secara berjenjang.

B.3.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Di samping Kepala Desa, LPM selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan sebagai lembaga yang banyak mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah terutama dalam hal Kebijakan Pembangunan. LPM adalah ketua pelaksana proses perencanaan pembangunan di desa, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu Kepala Desa mensosialisasikan Program Pemberdayaan Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi kepada masyarakat.
- b. Menghimpun dan menginventarisir rencana kegiatan dari setiap Dusun dan RT.
- c. Menyusun rencana kegiatan yang akan dimusyawarahkan dan membuat rumusan hasil musyawarah desa.
- d. Membentuk Kelompok Kerja/Masyarakat (Pokja/Mas) bersama Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.
- e. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik bersama Pokja, jika kewenangan tersebut diserahkan oleh pemerintah desa.
- f. Membantu Kepala Desa dan Sekdes dalam penyediaan kebutuhan material untuk kegiatan pembangunan yang ditugaskan atau dilimpahkan oleh Kepala Desa dan PTPKD.
- g. Mendampingi kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

- h. Bersama Kepala Desa menggerakkan partisipasi gotongroyong, dan swadaya masyarakat.
- i. Membantu kepala desa dalam perencanaan kegiatan pembangunan di desa bukan sebagai pengelola anggaran.

B.3.5. Kelompok Kerja (Pokja)

Desa wajib membentuk dan memfungsikan pokja untuk melaksanakan program desa mandiri, kelompok kerja adalah kumpulan berbagai elemen anggota masyarakat, yang tidak terikat dengan keorganisasiannya dalam kemasyarakatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

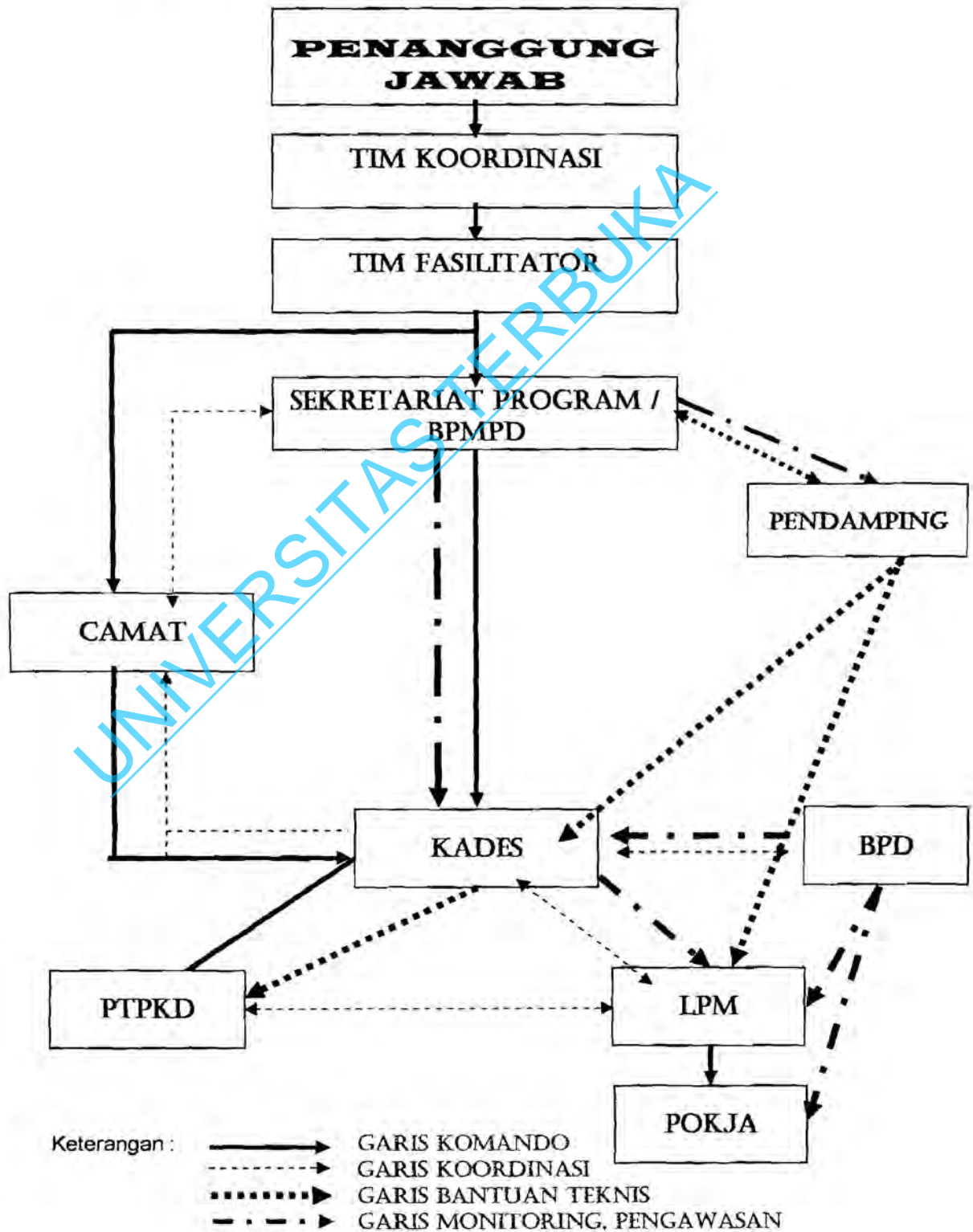
- a. Membantu menyiapkan / mengadakan kebutuhan material untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pedesaan yang ditugaskan atau yang dilimpahkan penyediaannya oleh PTPKD dan atau Kepala Desa.
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di lapangan.
- c. Bertanggung jawab bersama LPM dan pendamping terhadap penyelesaian fisik kegiatan sesuai rancangan teknis.
- d. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas (volume) fisik kegiatan pembangunan infrastruktur yang dipercayakan dibawah koordinator LPM.
- e. Menjaga, memelihara dan melestarikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Anggota kelompok kerja sebagai pekerja pelaksanaan fisik di lapangan, diprioritaskan kepada pemuda dan anggota masyarakat yang

menganggur atau semi pengangguran dari desa setempat, tidak dibenarkan pekerja dari luar desa yang bersangkutan. Ketua kelompok kerja diupayakan dari personil yang mengerti atas pekerjaan yang akan dikerjakan, mempunyai wawasan, bisa bekerjasama dan punya kepedulian untuk pembangunan desa, dapat ditunjuk dari unsur RT, Kepala Dusun, Kepala Parit, Tokoh Masyarakat, anggota BPD, anggota LPM.

Kepala Desa, Ketua LPM, Sekretaris Desa dan Ketua BPD tidak dibenarkan ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja. Kelompok kerja diberi identitas atau nama dengan nama buah-buahan, nama pohon, nama burung dan lain-lain. Setiap kelompok kerja hanya dapat mengerjakan 1 (satu) kegiatan kecuali jumlah masyarakat yang bisa bekerja terbatas. Setiap paket pekerjaan harus dibuatkan papan nama kegiatan

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

C. Hasil Penelitian

Pemimpin berdasarkan konsep teoritis memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam birokrasi pemerintahan maupun swasta. Kepala desa merupakan bagian dari pemimpin birokrasi yang perannya sangat penting dalam usaha mencapai tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Pasolong (2013: 33) menjelaskan peran pemimpin birokrasi sebagai berikut:

1. Peran Pengambil Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.
2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga bawahan atau pengikut mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.
3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan.
4. Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus

menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya.

5. Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya.

Selanjutnya empowerment atau pemberdayaan, secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara peneliti dengan informan, maka diketahui tanggapan informan terhadap peran Kepala Desa dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai berikut:

C.1. Peranan mengambil keputusan.

Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok pemimpin yang ada di desa tersebut, dalam mengatur, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri adalah salah satu program pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana program ini menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan, dibawah bimbingan dan koordinasi Kepala Desa.

Salah satu peran penting Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, antara lain melaksanakan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, perannya disini adalah bagaimana seorang Kepala Desa mengambil keputusan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan. Benaan dengan hal ini, yang menjadi peranan Kepala Desa dalam mengambil keputusan diantaranya, menetapkan skala prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, menunjuk penanggung jawab dan pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan. Untuk menetapkan sasaran program desa mandiri sudah semestinya

Kepala Desa melibatkan mitra kerja seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kelompok Kerja melalui musyawarah desa, namun kenyataannya tidak demikian. Padahal kesemuanya itu merupakan potensi yang harus dimiliki oleh kepala desa dalam mengambil keputusan, selain potensi internal yang sudah dimiliki seperti ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kepemimpinannya. Untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki Kepala Desa dalam mengambil keputusan, beberapa informan mengungkapkan sebagai berikut:

"Sebenarnya banyak potensi yang dimiliki Kepala Desa dalam mengambil keputusan, diantaranya Kepala Desa harus melakukan musyawarah dengan seluruh komponen dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, kemudian bisa juga meminta saran dan pendapat dari bawahannya seperti Sekdes dan perangkat desa lainnya. (Wawancara dengan Informan Bpk. Abu Ma'ah, 11 Mei 2013)

Senada dengan itu, Informan Ardiansyah menyatakan sebagai berikut:

"Cukup banyak potensi yang dimiliki Kepala Desa dalam mengambil keputusan, diantaranya Kepala Desa harus melakukan musyawarah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, seperti dengan LPM dan BPD". (Wawancara, tanggal 11 Mei 2013, pukul: 11.00 WIB).

Selain itu, informan H. Hasim Umar disaat wawancara mengatakan:

Menjadi Kepala Desa sudah seharusnya banyak potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan, seperti pengetahuan dan pengalaman, kemudian saran dan pendapat dari orang lain, bisa juga dari media masa seperti koran dan TV". (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 11.30 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa sebelum mengambil keputusan banyak potensi yang semestinya dimiliki oleh Kepala Desa, potensi itu bisa saja dari dalam diri sendiri, seperti pengetahuan dan pengalaman,

dan yang terpenting tentu potensi yang datang dari luar atau orang lain, bisa

berupa pendapat, saran dan masukan, kesemuanya itu tentu tidak bisa datang dengan sendirinya tanpa melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang Kepala Desa yang diamanahkan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin di desanya, dalam mengambil keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan saran, pendapat dan masukan dari siapa saja terutama sekali dari bawahan dan mitra kerjanya di desa. Selanjutnya peneliti menanyakan kepada informan, apakah Kepala Desa Pekan Kamis sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ? Pada umumnya informan menjawab belum memanfaatkannya, artinya dalam mengambil keputusan Kepala Desa cenderung masih memaksakan pendapat dan kehendak sendiri.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan, dalam menetapkan sasaran program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, apakah Kepala Desa sudah melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM) ?

Abu Ma'ah selaku Ketua BPD desa Pekan Kamis dalam wawancaranya dengan peneliti mengatakan:

"Kami selaku Ketua BPD tidak pernah diajak bermusyawarah oleh kepala desa dalam merumuskan sasaran program desa mandiri, padahal dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa salah satu tugas kami selaku BPD adalah mensukseskan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri bersama kepala desa, LPM serta memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan". (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 10.15 Wib).

Senada dengan Ketua BPD, Ketua LPM Ardiansyah, juga membenarkan pendapat itu, dan menyebutkan:

"Kepala Desa tidak pernah mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri" (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 11.00 WIB).

Selain itu Sekretaris BPD H. Hasyim Umar, juga mengatakan bahwa Kepala Desa tidak pernah mengajak anggota BPD untuk bermusyawarah. Dari hasil wawancara penulis dengan H. Hasyim Umar, beliau mengungkapkan:

"Bagaimana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis ini bisa berjalan dengan baik kalau dalam penyusunan rencana kegiatan saja, kami selaku anggota BPD tidak pernah dilibatkan. Semestinya kami diajak musyawarah oleh Kepala Desa, dalam menyusun program kegiatan yang akan dibuat, malah kami hanya sekedar diberitahu, apa yang akan dibangun dan dimana lokasinya". (wawancara, tanggal 11 Mei 2013, pukul: 11.30 Wib).

Kemudian Kepala Dusun Ardani juga sependapat dengan Sekretaris BPD dimana Kepala Desa tidak pernah bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk merencanakan program kegiatan.

"Saya selaku Kepala Dusun hanya sekedar diberitahu bahwa ada program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di dusun saya, bagaimana mekanismenya saya tidak pernah di kasih tahu oleh Kepala Desa". (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 12.00 Wib).

Dari beberapa hasil wawancara yang penulis lakukan diatas, dapat disimpulkan, bahwa dalam penyusunan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri Kepala Desa tidak melibatkan mitra kerja seperti BPD, LPM, Kepala Dusun dan yang lainnya, hal ini dapat dikatakan Kepala Desa mengambil keputusan sendiri tanpa melalui musyawarah desa terlebih dahulu.

Keputusan merupakan kebijakan pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, maka sudah seharusnya seorang pemimpin sebelum

diputuskannya. Pertimbangan itu tidak serta merta hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan masukan, saran dan pendapat dari orang lain. Berkaitan dengan kepemimpinan kepala desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilihan Hulu dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, sudah semestinya kepala desa melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan berbagai pihak terutama sekali dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan program ini, diantaranya BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT. Hal ini dilakukan agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil kepala desa sudah merupakan kesepakatan bersama antara kepala desa dengan komponen masyarakat, dan sudah sesuai pula dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian fungsi pemberdayaan masyarakat sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya peneliti mendalami tentang peranan kepala desa dalam mengambil keputusan ini, disaat menyusun program desa mandiri, apakah kepala desa mengutamakan skala prioritas ? dari beberapa wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat diketahui sebagai berikut:

Abu Ma'ah ketua BPD Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilihan Hulu mengatakan bahwa:

"Kepala Desa dalam menyusun program pemberdayaan desa menuju desa mandiri belum mengutamakan skala prioritas, tetapi berdasarkan kedekatan kepala desa dengan masyarakat yang akan memanfaatkan program tersebut" (wawancara: 11 Mei 2013, pukul: 10.15 Wib).

Senada dengan itu, ketua RW.I desa Pekan Kamis yaitu, A. Rahman Sidik juga mengatakan bahwa:

“Kepala Desa belum memperhatikan skala prioritas dalam menyusun program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, hal ini disebabkan karena kepala desa tidak melaksanakan musyawarah terlebih dahulu sebelum menetapkan program kegiatan” (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 12.30 WIB).

Sementara itu ketua RW.II Jadri mengungkapkan:

“Semestinya Kepala Desa dalam menyusun program desa menuju desa mandiri harus mengutamakan skala prioritas, karena banyak program pembangunan yang harus dilakukan di desa ini, maka untuk memilah dan terbatasnya dana yang ada maka harus dilihat mana yang perlu di prioritaskan” (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 13.00 WIB).

Kemudian ketua RT.01 Ratmir juga mengungkapkan:

“Menurut saya Kepala Desa dalam menentukan program kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri, belum mengutamakan skala prioritas, saya lihat banyak yang harus diutamakan dalam pembangunan di desa ini, tapi nyatanya banyak pula yang salah sasaran, mungkin ini karena tidak di musyawarahkan terlebih dahulu”.(wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 13.30 WIB).

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa Kepala Desa Pekan Kamis dalam menentukan sasaran program desa menuju desa mandiri belum mengutamakan skala prioritas. Padahal menentukan skala prioritas ini sangatlah penting artinya, agar dana yang tersedia tepat guna dan tepat sasaran dalam membangun, dan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat desa.

Tentang strategi yang dilakukan Kepala Desa, dalam memperhatikan kepentingan masyarakat, mengenai hal ini penulis menanyakan langsung kepada Sekretaris BPD Desa Pekan Kamis, yaitu bapak H. Hasyim Umar, beliau mengatakan:

“Strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri belum memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi cenderung pada kepentingan kepala desa dan kelompok-kelompok tertentu”. (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 11.30 Wib).

Senada dengan itu sekretaris LPM, M. Aini juga mengatakan:

“Strategi yang dilakukan Kepala Desa cenderung terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan Kepala desa”, (Wawancara, 11 Mei 2013 pukul: 15.00 Wib).

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi-perumusan.html>, diakses senin, 21 Juli 2013).

Dari definisi strategi diatas, dapat diketahui dalam menyusun program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, agar kepentingan masyarakat terpenuhi maka Kepala Desa dalam proses penentuan rencana harus berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dari beberapa pernyataan informan dan dikaitkan dengan definisi strategi diatas dapat disimpulkan, bahwa Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program desa menuju desa mandiri, belum melaksanakan strategi yang baik, dimana strategi yang dilakukan belum berfokus pada tujuan jangka panjang, dan proses perencanaan program cenderung terhadap masyarakat atau kelompok

tertentu, artinya Kepala Desa belum memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Berkaitan dengan peningkatan sumber daya masyarakat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa Ratnawati mengatakan:

“Dalam pengelolaan program desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis, Kepala Desa belum memberdayakan masyarakat, padahal dalam petunjuk teknis sudah dijelaskan bahwa, dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa wajib membentuk dan menfungsikan kelompok kerja (pokja) untuk melaksanakan program desa mandiri, kelompok kerja adalah kumpulan berbagai elemen anggota masyarakat, yang tidak terikat dengan keorganisasiannya dalam kemasyarakatan” (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.30 Wib)

Sesuai dengan Sekretaris Desa di atas, Ketua LPM desa Pekan Kamis Ardiansyah mengatakan:

“Semestinya Kepala Desa wajib memberdayakan masyarakat desa, karena sepengetahuan saya, pemberdayaan desa itu adalah bagaimana Kepala Desa bisa memberikan peranan kepada masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, guna untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian masyarakat” (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 11.00 WIB).

Dari pendapat di atas dapat dikatakan kondisi ini mengakibatkan desa Pekan Kamis, belum mampu menciptakan hasil pekerjaan melebihi dari target yang telah ditetapkan (over prestasi) terhadap pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegagalan desa Pekan Kamis menciptakan over prestasi dalam pengelolaan desa menuju desa mandiri adalah

Kepala Desa belum optimal memberdayakan masyarakatnya. Hal ini tentu sudah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi tujuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggulirkan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri. Dimana tujuan pemberdayaan desa adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan prakarsa dan kreativitas desa, agar mampu dan mandiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan desa dan peran serta masyarakat. (BPMPD Kab. Inhil, 2012: 8)

Berikut tentang penanggung jawab paket kegiatan, dalam petunjuk teknis kegiatan sudah ditegaskan bahwa anggota kelompok kerja sebagai pekerja pelaksanaan fisik di lapangan, diprioritaskan kepada pemuda dan anggota masyarakat yang menganggur atau semi-pengangguran dari desa setempat, tidak dibenarkan pekerja dari luar desa yang bersangkutan. Ketua kelompok kerja diupayakan dari personil yang mengerti atas pekerjaan yang akan dikerjakan, mempunyai wawasan, bisa bekerjasama dan punya kepedulian untuk pembangunan desa, dapat ditunjuk dari unsur RT, Kepala Dusun, Kepala Parit, Tokoh Masyarakat, anggota BPD, anggota LPM, artinya Kepala Desa harus membentuk kelompok kerja dari komponen masyarakat desa itu sendiri, dan menunjuk ketua kelompok sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan masyarakat desa Pekan Kamis.

Berkenaan dengan hal itu, hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Bendahara LPM bernama Undul mengatakan bahwa:

"Kepala Desa tidak membentuk kelompok kerja di setiap paket kegiatan, walaupun untuk itu pakainya pada paket kegiatan tertentu saja, dan yang

ditunjukpun orang-orang yang dekat dengan kepala desa". (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 10.00 Wib).

Senada dengan Bendahara LPM, Bendahara BPD Darmawan juga berpendapat demikian:

"Dalam petunjuk teknis kegiatan sudah ditegaskan bahwa Kepala Desa harus menunjuk ketua kelompok kerja sebagai penanggung jawab kegiatan, yang tugasnya bertanggung jawab bersama LPM dan pendamping terhadap penyelesaian fisik kegiatan sesuai rancangan teknis. Kemudian bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas (volume) fisik kegiatan pembangunan infrastruktur yang dipercayakan dibawah koordinator LPM namun kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh kepala desa" (wawancara, 20 Mei 2023, pukul: 10.30 Wib).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, Kepala Desa Pekan Kamis tidak menunjuk penanggung jawab kegiatan, berarti Kepala Desa tidak mempedomani petunjuk teknis yang disampaikan BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya tentang pengaturan waktu penyelesaian program kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri. Beberapa informan mengatakan, diantaranya Ketua RW.I A. Rahman Sidik, beliau mengatakan bahwa:

"Hampir setiap tahun banyak paket kegiatan yang tidak selesai tepat waktu", (wawancara, tanggal 20 Mei 2013, pukul: 11.00 Wib).

Kemudian ketua RW.II Jadri mengatakan:

"Tidak semua paket kegiatan ditetapkan waktu penyelesaiannya oleh Kepala Desa, padahal ini sangat penting, karena program ini ada batas waktunya, yaitu pada bulan Desember setiap tahunnya" (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 11.20 Wib).

Selain itu ketua RT.03 Mukhtar menjelaskan:

"Meskipun dari pihak Kabupaten sudah menetapkan batas waktu penyelesaian kegiatan, yaitu bulan Desember, semestinya Kepala Desa juga harus menyusun jangka waktu penyelesaian kegiatan ini dengan

sebaik-baiknya, agar penyelesaian paket kegiatan itu tidak melebihi tahun anggaran yang telah ditetapkan oleh Kabupaten, kapan perlu sebelum bulan Desember semua paket kegiatan sudah dapat diselesaikan semuanya, sehingga kita dapat mengevaluasi seluruh paket kegiatan, apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak kabupaten” (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 11.30 Wib).

Selanjutnya Ketua RT.04 Syafrudin mengatakan:

“Setahu saya tidak ada, makanaya pada tahun 2012 paket kegiatan semenisasi jalan Bakul RT.04 baru selesai 100% pada bulan Januari 2013”. (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 11.40 Wib).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa Kepala Desa Pekan Kamis, belum menyusun dan mengatur waktu penyelesaian kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, sehingga banyak paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai batas akhir tahun anggaran yaitu bulan desember.

Mendalami hasil wawancara diatas, selanjutnya penulis menanyakan apakah setiap keputusan Kepala Desa sudah dapat dikatakan arif dan bijaksana ? Hasil wawancara dengan Kepala Dusun yang bernama Ardani, mengatakan dan berpendapat bahwa:

“Selama yang saya ketahui Kepala Desa Pekan Kamis dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan di desa belum arif dan bijaksana, karena selalu memaksakan kehendak”. (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 14.30 Wib).

Begitu juga yang dikatakan Ketua RT.04 Syafrudin, yaitu:

“Menurut saya keputusan yang diambil Kepala Desa selama ini belum arif dan bijaksana, bagaimana bisa bijaksana musyawarah saja jarang dilaksanakan Kepala Desa” (wawancara, pada tanggal: 21 Mei 2013, pukul 10.00 Wib).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ketua RT.05 Ajiman kepada penulis melalui wawancara dengan beliau:

“Bagaimana Kepala Desa dapat dikatakan arif dan bijaksana dalam keputusannya, kalau Kepala Desa itu mengambil keputusan sendiri saja tanpa melibatkan komponen masyarakat” (wawancara, 21 Mei 2013, pukul 10.30 Wib).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas, tentang peranan Kepala Desa dalam mengambil keputusan, dapat diketahui bahwa Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, belum melaksanakan perannya selaku Kepala Desa sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dari indikator yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala Desa belum melaksanakan musyawarah dengan komponen dan lembaga masyarakat yang ada seperti BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW, RT dan lain sebagainya, dalam menyusun dan menetapkan rencana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.
- b. Kepala Desa Pekan Kamis dalam menentukan sasaran program desa menuju desa mandiri belum mengutamakan skala prioritas, padahal menentukan skala prioritas ini sangatlah penting artinya, agar dana yang tersedia tepat guna dan tepat sasaran dalam membangun, dan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat desa.
- c. Kepala Desa dalam pengelolaan program desa menuju desa mandiri, belum melaksanakan strategi yang baik, dimana strategi yang dilakukan cenderung terhadap masyarakat atau kelompok tertentu,

artinya Kepala Desa belum memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

- d. Kepala Desa tidak menunjuk penanggung jawab kegiatan.
- e. Kepala Desa Pekan Kamis, belum menyusun dan mengatur waktu penyelesaian kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, sehingga banyak paket kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir sesuai batas akhir tahun anggaran yaitu bulan desember.

Berpedoman dari petunjuk teknis yang telah dibuat oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai pedoman pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri mempunyai kewenangan yaitu :

- a. Menyusun APBDesa, bersama perangkat desa, BPD dan LPM.
- b. Merumuskan penggunaan dana operasional atau anggaran tidak langsung.
- c. Pengarah forum musyawarah tingkat Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengendalian dan pemeliharaan kegiatan.
- d. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten.

- f. Mengkonsultasikan dengan segera kepada Camat dan BPMPD apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkembang berkenaan dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa.
- g. Selain itu tugas Kepala Desa wajib memberdayakan Lembaga yang ada di Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Kepala Desa Pekan Kamis belum mempedomani petunjuk teknis tersebut dalam pengelolaan desa menuju desa mandiri, sehingga dapat dikatakan Kepala Desa Pekan Kamis belum melaksanakan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

C.2. Peran mempengaruhi.

Kepala Desa selaku pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga bawahan atau pengikut mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja. Apakah Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, sudah melaksanakan peran ini terhadap bawahannya ? Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut:

Penulis menanyakan, sebelum mengambil keputusan, apakah Kepala Desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ? Beberapa informan mengatakan, diantaranya Sekretaris Desa Pekan Kamis, Ratnawati, beliau mengatakan

"Kepala Desa sebelum mengambil keputusan belum pernah meminta masukan dan saran dari saya, padahal banyak hal juga yang perlu saya sarankan demi kebaikan beliau dan kemajuan desa". (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.30 Wtb)

Selanjutnya Kepala Urusan Pembangunan, Syahdan Z. menimpali pernyataan sekretaris desa, dan mengatakan:

“Sebagai Kepala Urusan Pembangunan di desa ini, seharusnya Kepala Desa terlebih dahulu menyerahkan perencanaan pembangunan kepada saya, kemudian baru dibawa dalam musyawarah desa dengan lembaga desa dan tokoh masyarakat, tapi kenyataannya selama ini, rasanya belum pernah dilakukan oleh Kepala Desa” (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.45 Wib).

Dari jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dalam mengambil keputusan tidak meminta masukan terlebih dahulu dari bawahan atau mitra kerja. Artinya Kepala Desa belum dapat mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, dengan demikian dapat dikatakan Kepala desa Pekan Kamis belum dapat melaksanakan peranya secara optimal mempengaruhi bawahan dan mitra kerjanya dalam bekerja.

C.3. Peran Memotivasi.

Berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai atau bawahan untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah peran mempengaruhi yang efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota masyarakat. Motivasi dapat juga diartikan sebagai proses untuk mencoba mempengaruhi orang atau orang-orang yang dipimpinnya agar melakukan pekerjaan yang diinginkan, sesuai dengan tujuan tertentu yang ditetapkan lebih dahulu, (Uno, 2011:1).

Berkenaan dengan peran kepemimpinan Kepala Desa Pekan Kamis dalam memberikan motivasi kepada bawahan atau mitra kerjanya, penulis telah melakukan wawancara dengan informan, diantaranya melalui wawancara dengan Kepala Urusan Umum Desa Pekan Kamis yaitu, Arbain NP. beliau mengatakan bahwa:

“Kepala Desa tidak pernah memberikan motivasi kepada bawahan, bahkan Kepala Desa membiarkan perangkat desa kerja masing-masing”. (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 14.00 Wib)

Selain itu Kepala urusan pemerintahan desa Pekan Kamis, Herman mengatakan:

“Kepala Desa seolah-olah tidak mau tahu dengan apa yang harus kami kerjakan, sementara kami selaku bawahan sangat memerlukan arahan, petunjuk dan bimbingan dari pimpinan dalam hal ini Kepala Desa, sehingga kami tidak kehilangan arah dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat”. (wawancara, 20 Mei 2013, pukul 14.30)

Melihat jawaban informan diatas, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Pekan Kamis boleh dikatakan tidak ada memberikan motivasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pegawai desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa Pekan Kamis sebagai motivator belum optimal atau belum terlaksana dengan baik, hal ini apabila dibiarkan tentu akan berdampak negatif terhadap kinerja bawahan dan mitra kerja Kepala Desa itu sendiri.

C.4. Peran antar pribadi.

Peran antar pribadi, yaitu peran strategik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur

atau tokoh yang cukup dihargai. Artinya pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya. Hal ini juga berlaku bagi kepemimpinan Kepala Desa yang harus bisa menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahan, mitra kerja bahkan bagi masyarakatnya. Berkenaan dengan itu apakah Kepala Desa Pekan Kamis sudah melaksanakan peran antar pribadi dalam kepemimpinannya ? Untuk mengetahui jawaban terhadap pertanyaan itu, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya, Sekretaris Desa Pekan Kamis Ratnawati mengatakan bahwa:

"Selama ini belum ada yang dapat diteladani dari kepemimpinan Kepala Desa, seperti kurang disiplin, selalu memaksakan kehendak sendiri dan dalam mengambil keputusan cenderung kurang bijaksana". (Wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.30 Wib).

Begitu juga Ketua BPD Abu Ma'ah mengungkapkan:

"Tidak ada yang dapat diteladani dari kepemimpinan Kepala Desa Pekan Kamis yang sekarang ini, saya merasakan sendiri, coba bayangkan saya selaku Ketua BPD yang merupakan mitra kerjanya, selalu ditinggalkan atau tidak dibawa serta dalam merencanakan program pembangunan di desa ini, padahal Kepala Desa sudah tau bahwa saya dan anggota BPD lainnya itu, sesuai dengan peraturan yang ada sudah jelas tugas dan fungsi kami", (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 10.15 Wib).

Senada dengan informan diatas, Ketua LPM Ardiansyah juga mengatakan:

"Teladan apa yang dapat diambil dari Kepala Desa Pekan Kamis yang sekarang ini, kami selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan sebagai lembaga yang banyak mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah terutama dalam hal Kebijakan Pembangunan. LPM adalah ketua pelaksana proses perencanaan pembangunan di desa. Dimana salah satu tugas kami adalah menyusun rencana kegiatan yang akan dimusyawarahkan dan membuat rumusan hasil musyawarah desa, malah

dalam pembangunan desa, dan kami melihat maunya bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain”, (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul 11.00 Wib).

Selanjutnya Ketua RT.04 Syafrudin, menyebutkan

“Tidak ada rasanya yang dapat diteladani dari sosok Kepala Desa Pekan Kamis yang sekarang ini”, (Wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 15.00 Wib).

Kemudian Ketua RT.05 Ajiman mengungkapkan:

“Meskipun ada yang bisa dilihat segi positifnya, tapi lebih banyak yang tidak bisa diteladani dari Kepala Desa Pekan Kamis”, (Wawancara, tanggal 11 Mei 2013, pukul: 15.30 Wib).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Pekan Kamis belum memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan dan mitra kerjanya, hal ini tentu juga akan berdampak negatif terhadap kepemimpinan Kepala Desa, dan juga berpengaruh terhadap pembangunan, khususnya dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.

C.5. Peran Informasional.

Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya. Peran informasional akan berjalan efektif apabila komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan

baik dan efektif. Begitu juga sebaliknya apabila komunikasi tidak berjalan baik, tentu akan sangat sulit menyampaikan informasi kepada bawahan.

Sehubungan dengan peran informasional ini, apakah Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, sudah menerapkan peran ini dalam kepemimpinannya, terutama dalam hal pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri? Untuk mengetahui jawabannya, peneliti sudah melakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain, dengan Sekretaris Desa Pekan Kamis Ratnawati mengatakan bahwa:

"Sepengetahuan saya komunikasi Kepala Desa dengan kami selama ini, menurut saya masih kurang baik dan efektif, karena kepala desa hanya memberika informasi, bahwa akan ada beberapa program pemberdayaan desa menuju desa mandiri pada tahun itu, mengenai bagaimana mekanismenya kami jarang sekali diberi tahu", (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.30 Wib)

Senada dengan apa yang disampaikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan Syahdan Z. juga mengatakan:

"Komunikasi Kepala Desa dengan kami sangat jarang sekali, sepengetahuan saya komunikasi antara Kepala Desa dengan kami sekedarnya saja, dan yang dibicarakan yang penting-penting saja", (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 13.45 Wib).

Begitu juga Ketua RW.I A.Rahman Sidik mengungkapkan:

"Semestinya Kepala Desa harus sering menjalin komunikasi dengan kami, terutama masalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, tapi hal ini jarang sekali kami dapatkan", (wawancara, 20 Mei 2013, pukul: 11.00 Wib).

Selanjutnya Sekretaris LPM, M. Aini mengatakan:

"Informasi itu bagi kami sangat penting, agar kami dapat menyiapkan rencana kegiatan secepatnya, dan dengan sebaik-baiknya, tetapi informasi yang kami terima dari Kepala Desa selalu terlambat, dan itupun segala sesuatunya sudah disiapkan sendiri oleh Kepala Desa, maka dapat kami katakan komunikasi kami dengan Kepala Desa belum berjalan sesuai dengan semestinya", (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 15.00 Wib).

Senada dengan pendapat diatas, ketua RT.05 Ajiman mengungkapkan:

"Komunikasi kami dengan Kepala Desa jarang sekali, apalagi membicarakan masalah pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, kami hanya diberitahu kalau ada program desa mandiri di tempat kami", (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 15.30 Wib).

Begitu juga dengan Ketua Kelompok kerja (pokja) I Syamsudin, mengatakan:

"Komunikasi kami dengan Kepala Desa jarang sekali, sehingga informasipun jarang juga kami terima dari Kepala Desa", (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 15.30 Wib).

Kemudian Ketua Kelompok Kerja (pokja) II Abdul Hamid, juga berpendapat demikian:

"Meskipun antara kami dengan Kepala Desa ada melakukan komunikasi, tapi yang kami bicarakan hanya hal-hal biasa yang kami alami dalam hidup sehari-hari", (wawancara, 11 Mei 2013, pukul: 16.00 Wib).

Dari jawaban informan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dengan bawahan dan mitra kerja dapat dikatakan kurang efektif dan belum baik . Hal ini tentu akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan roda pemerintahan desa, dengan sendirinya juga akan berdampak negatif terhadap pengelolaan program

Tembilahan Hulu. Dengan demikian kedepannya perlu menjadi perhatian bagi Kepala Desa untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan semua pihak, agar peran Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik. Dengan sendirinya peran informasional Kepala Desa akan berjalan sesuai dengan fungsinya.

D. Pembahasan

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dengan menggulirkan Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, merupakan kebijakan yang melibatkan masyarakat desa untuk membangun dari bawah.

Dalam beberapa teori menjelaskan bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih berhasil. Akan tetapi pemerintah harus terus menerus melakukan pengawasan terhadap program tersebut, baik dengan sosialisasi dan pendampingan sehingga program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dengan demikian kebijakan pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan dengan memperkuat kemandirian desa dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan ketahanan desa sebagai wilayah produksi; serta meningkatkan daya tarik pedesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan seiring dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan.

pengembangan kapasitas masyarakat, yang berorientasi kepada karakteristik dan kebutuhan serta aspirasi lokal; (2) Pembangunan yang partisipatif; dan kepemimpinan lokal serta kelembagaan perdesaan berperan penting dalam proses menuju keberlanjutan pembangunan; (3) Berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah perdesaan, diperlukan penataan ruang perdesaan yang dapat mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan wilayah yang didukungnya, serta konservasi sumber daya alam.

Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Dari penelitian ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat tepat dengan melibatkan masyarakat setempat dalam membangun desanya masing-masing. Dengan demikian peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam mengkoordinir pelaksanaan pembangunan di desanya, dalam

hal ini pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Program Pemberdayaan desa menuju desa mandiri adalah menumbuh kembangkan dan meningkatkan prakarsa serta kreativitas desa, agar mampu dan mandiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya melalui peningkatan fungsi kelembagaan desa dan peran serta masyarakat (BPMPD Kab. Inhil, 2012: 8).

Secara umum Pemberdayaan desa dapat dikategorikan dalam 2 kelompok sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Kelembagaan Desa.

Adalah memfungsikan dan meningkatkan prakarsa dan kreativitas kelembagaan desa yang ada, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengatur dan menngurus kepentingan masyarakat. Baik Kepala Desa denga perangkatnya, BPD dengan anggotanya dan LPM dengan anggotanya.

2. Pempaerdayaan Masyarakat.

Adalah memberikan peranan kepada masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, guna menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara perorangan dan berkelompok untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan partisipatif adalah mengikutsertakan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan, yang berpegang teguh kepada

musyawarah sebagai keputusan teretinggi, dibawah koordinasi, arahan dan bimbingan kelembagaan desa (Kepala Desa, BPD dan LPM).

Berdasarkan hasil jawaban informan melalui wawancara yang telah dikemukakan diatas, penulis akan mencoba membahas dan menganalisis peran kepala desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Peran Pengambil Keputusan, yaitu pemimpin birokrasi sebagai *top manager* khususnya, memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilakukan. Dalam hal ini menetapkan, prioritas, strategi, struktur formal, alokasi sumber-sumber daya, pertunjukan tanggung jawab dan pengaturan kegiatan-kegiatan.

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dimana peran kepala desa sebagai pengambil keputusan belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang menjadi indikator keberhasilan kepala desa dalam pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan diantaranya:

- a. Dalam menetapkan sasaran program kegiatan Desa mandiri, Kepala Desa tidak melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM)
- b. Dalam menyusun program Desa mandiri, Kepala Desa belum mengutamakan skala prioritas.

- c. Strategi yang dilakukan Kepala Desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat.
 - d. Alokasi sumber daya belum ditingkatkan oleh Kepala Desa.
 - e. Dalam pelaksanaan program kegiatan Kepala Desa tidak menunjuk penanggung jawab paket kegiatan atau tidak membentuk kelompok kerja.
 - f. Dalam mengambil keputusan Kepala Desa belum arif dan bijaksana.
 - g. Sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja. Padahal sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, dikatakan musyawarah merupakan keputusan tertinggi, dibawah koordinasi, arahan dan bimbingan kelembagaan desa yaitu Kepala Desa, BPD dan LPM.
2. Peran mempengaruhi, yaitu pemimpin birokrasi harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga mau bekerja sama dalam merealisasikan suatu program kerja.

Dilihat dari peran mempengaruhi ini, Kepala Desa Pekan Kamis juga belum dapat melaksanakan perannya dengan baik, dimana seorang Kepala Desa seharusnya dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, hal ini tidak dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu Kepala Desa semestinya dapat memberikan contoh teladan kepada bawahan, malahan hal ini juga tidak dilakukan oleh Kepala Desa, melihat kenyataan ini tentu sangat sulit bagi bawahan untuk bekerja sesuai

dengan apa yang diharapkan. Kalau hal ini masih tetap berlanjut terus menerus, sudah jelas akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan di desa itu, termasuk dalam hal pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

3. Peran memotivasi, yaitu berkaitan dengan pemberian dorongan kepada pegawai untuk bekerja lebih giat. Hubungan pengaruh dan motivasi adalah kalau peran mempengaruhi efektif, maka peran memotivasi akan lebih mudah dilakukan.

Motivasi merupakan istilah umum yang mencakup keseluruhan dorongan keinginan, kebutuhan, dan gaya yang sejenis (Koontz dan Weichrich dalam Uno, 2011: 66). Dengan menyatakan bahwa para manajer memotivasi bawahan, berarti mereka melakukan hal-hal yang diharapkan dapat memuaskan dorongan bagi bawahan untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan (Uno, 2011: 66).

Dengan demikian motivasi atau dorongan dari pimpinan kepada pegawai atau bawahan sangatlah diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak demikian halnya di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu, dari hasil wawancara langsung penulis dengan perangkat desa, dapat dibuktikan bahwa Kepala Desa boleh dikatakan tidak pernah memberikan motivasi kepada bawahan atau pegawai, sehingga dapat dipastikan semangat kerja bawahan atau perangkat desa tentu juga akan berkurang, dan apabila hal ini terjadi setiap saat tentu juga akan berdampak negatif terhadap kinerja pegawai

itu sendiri, dengan demikian jelas akan berpengaruh negatif pula terhadap program pembangunan di desa itu.

4. Peran antar pribadi, yaitu peran stratejik pada peran antar pribadi, dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemimpin birokrasi, adalah sebagai figur atau tokoh yang cukup dihargai. Dalam hal ini pemimpin harus menempatkan diri sebagai panutan, pemberdaya, dan pendorong bagi bawahannya.

Sebagai Kepala Desa yang menjadi figur dan tokoh yang semestinya cukup dihargai di tengah-tengah masyarakat, semestinya harus mampu memainkan perannya dalam segala hal. Kalaulah peran ini dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokoknya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tentu hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi akan dapat diatasi dengan baik. Namun kenyataan yang ditemui di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu tidak demikian, dimana Kepala Desa belum dapat melaksanakan peran antar pribadinya, hal ini dapat dilihat dari keputusan atau kebijakan yang diambil Kepala Desa tidak pernah terlebih dahulu meminta masukan dan pertimbangan dari bawahan apalagi dari mitra kerja, padahal hal ini sangat penting dilakukan oleh Kepala Desa agar keputusan dan kebijakan yang diambil tidak salah dikemudian hari.

5. Peran Informasional, yaitu peran informasional yang dimiliki seorang pemimpin birokrasi sangat strategis, mengingat pemimpin birokrasi adalah pemegang kunci, khususnya informasi tentang birokrasi yang

dipimpinnya. Peran informasional adalah menjelaskan kepada bawahan menyangkut rencana-rencana kebijakan, serta harapan peran, dan instruksi tentang cara pekerjaan harus dilakukan, tanggung jawab bagi para bawahan atau anggota tim, dan tujuan-tujuan kinerja dan otorisasi rencana tindakan untuk mencapainya.

Peran informasional ini sangatlah erat kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, kalau komunikasi baik dan efektif dengan bawahan dan mitra kerja lainnya, tentu informasi yang akan disampaikan juga akan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh bawahan dan mitra kerja, begitu juga sebaliknya apabila komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan bawahan dan mitra kerja lainnya tidak efektif, jelas akan menimbulkan salah persepsi antara Kepala Desa dengan bawahan dan mitra kerja.

Mencermati hal ini di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilihan Hulu, dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, peran ini juga belum dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dari pengamatan penulis hal ini terjadi karena Kepala Desa cenderung ingin bekerja sendiri, tanpa harus melibatkan bawahan atau mitra kerja seperti BPD dan LPM. Padahal dalam petunjuk teknis kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir, sudah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan program ini Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dan LPM, dan memberdayakan masyarakat desa dengan membentuk kelompok-kelompok kerja.

Menyikapi persoalan ini, penulis mencoba menelusuri melalui Camat Tembilahan Hulu, apa sebenarnya yang terjadi di desa Pekan Kamis, sehingga peran Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan apa solusi dari pemerintah Kecamatan untuk mengatasi hal ini. Camat Tembilahan Hulu, H. M. Yusuf N, mengatakan bahwa:

"Kami mengakui pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya, setelah kami telusuri dan kami pelajari penyebabnya adalah, mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPMPD, tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, seperti musyawarah desa, penetapan lokasi kegiatan, pembentukan kelompok kerja semua itu tidak dilakukan oleh Kepala Desa, kalau itu ada semua itu hanya ditentukan dan ditunjuk sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan mitra kerjanya yaitu BPD dan LPM. Sehingga peran masing-masing lembaga desa itu tidak berjalan dengan semestinya, dengan demikian tentu akan berdampak terhadap hasil pekerjaan, dimana kita ketahui dari tahun 2008, sampai berakhirnya tahun anggaran tidak ada pekerjaan yang dapat diselesaikan 100%. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah, melakukan pembinaan kepada Kepala Desa, mengajak seluruh komponen masyarakat agar mau bekerja sama dengan Kepala Desa, mengawasi dan memantau secara berkala pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ini, memfasilitasi kegiatan, dan terakhir pada tahun 2012 kegiatan ini sesuai petunjuk Bupati Indragiri Hilir, melalui BPMPD kabupaten Indragiri Hilir diambil alih pelaksanaannya oleh pihak Kecamatan, hal ini dilakukan karena pada tahun 2011 pencapaian programnya juga masih gagal atau tidak mencapai target. Meskipun di tahun 2012 pencapaiannya juga belum maksimal, tetapi progresnya sudah cukup tinggi, hal ini bukan disebabkan oleh mekanisme, tetapi dikarenakan oleh faktor non teknis di lapangan, seperti sulitnya mendapatkan bahan material, hal ini juga telah diketahui oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir. Kedepannya kami akan terus melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dan seluruh komponen masyarakat di desa Pekan Kamis, mudah-mudahan di tahun 2013 ini akan ada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa pekan Kamis ini". (wawancara, 05 Juni 2013, pukul: 10.00 Wib).

Akibat dari kurang efektifnya peran Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, berdampak terhadap hasil pelaksanaan program itu sendiri, dimana semua paket kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa berhasil atau gagalnya program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari peran Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di desa. Maka dapat disimpulkan:

Peran Kepala Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri dapat dikatakan belum optimal atau belum sesuai dengan harapan, dan kurang efektif melaksanakan fungsinya sebagai koordinator pembangunan di desa, ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan sasaran program kegiatan Desa mandiri, Kepala desa tidak melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM)
2. Dalam menyusun program Desa mandiri, Kepala Desa belum mengutamakan skala prioritas.
3. Strategi yang dilakukan Kepala Desa, belum memperhatikan kepentingan masyarakat.
4. Alokasi sumber daya belum ditingkatkan oleh Kepala Desa.
5. Dalam pelaksanaan program kegiatan Kepala Desa tidak menunjuk Penanggung jawab paket kegiatan atau tidak membentuk kelompok kerja.
6. Kepala Desa belum mengatur dan menetapkan waktu penyelesaian kegiatan, sehingga banyak kegiatan yang tidak selesai tepat waktu.

7. Kepala Desa belum memberikan keteladanan yang baik kepada bawahan.
8. Dalam mengambil keputusan Kepala desa belum arif dan bijaksana.
9. Sebelum mengambil keputusan, Kepala Desa sering tidak meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja.
10. Kepala Desa tidak ada memberikan motivasi terhadap bawahan.
11. Komunikasi Kepala Desa, dengan bawahan dan mitra kerja dapat dikatakan kurang baik dan kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyusun dan merekomendasikan saran untuk meningkatkan peran Kepala Desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya kebijakan Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri tetap di program setiap tahunnya, dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, serta lakukan pengawasan dengan baik.
2. Kepada DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dapat mendukung Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, yang telah di programkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan menyetujui setiap anggaran yang diajukan oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir untuk program pemberdayaan desa ini.
3. Agar program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ini dapat dikelola

dengan baik, kiranya BPMPD selaku leading sektor program dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengelola program dilapangan, diantaranya kepada kepala desa, sekdes, LPM dan BPD.

4. Camat selaku pembina dan koordinator pemberdayaan desa menuju desa mandiri, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri, agar pelaksanaan program ini dapat dikelola dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan.
5. Agar Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri dapat terlaksana sesuai dengan harapan, kiranya Kepala Desa dapat melaksanakan perannya dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan semua mitra kerja dan stekholder yang ada di desa.
6. Kepada tokoh masyarakat dan masyarakat desa Pekan Kamis umumnya, agar mendukung dan berpartisipasi dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Desa menuju Desa Mandiri yang digulirkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Kepada LSM yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kiranya dapat ikut serta memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta ikut memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abadi M. Husnu, Heri Zulfan, dkk. (2003), *Parlemen Desa Membangun Demokrasi dari Bawah*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Abdullah Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Adi I.Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Aditama, T. Yoga. (2002), *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Edisi Kedua, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikuntoro, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin. (1994). *Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dirawat, Lamberi, B. & Fachrudi, S.I. (1983). *Pengantar Kepemimpinan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Gunadi. (2010). *Management Miracle Series Good Leadership vs Bad Leadership*, Bogor: YPMB.
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. (1996). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Nitisemito, Alex S. (1986). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PasaLong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen P. (2002). *Perilaku Organisasi Edisi Kelima (Terjemahan Halida dan Dewi Sartika)*. Jakarta: Erlangga
- Safaria Triantoro. (2004). *Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, Sondang P. (1992). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung.

Singarimbun, M. (2003). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES

Sudijono, Anas. (2004). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

_____ (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. (2006). *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*, Cetakan ke 7, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Toha, Miftah. (2010). *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta: Rajawali Pers.

Uno, Hamzah B. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, Jakarta, Bumi Aksara.

Wahjosumidjo. (1987). *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Yukl Gary. (2010), *Kepemimpinan dalam organisasi (Leadership in Organization)*, Jakarta: Indeks.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, *tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126.

_____, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005, *Tentang Desa*, Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158.

Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta Tahun 2007.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 04 Tahun 2008, *Tentang Kedudukan Keuangan Desa*, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 04.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2010, *tentang Petunjuk pelaksana Program Pemberdayaan Desa Menuju desa Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir*, Tembilahan Tahun 2010.

Sumber Lain :

"*Konsep-strategi-definisi-perumusan*", <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/html>, Diambil, 21 Juli 2013.

Maharani, Ania (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil 6 april 2013, dari situs World Wide Web <http://www.akijakarta.bkkbn.go.i>

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir, *Petunjuk teknis Program pemberdayaan desa menuju desa mandiri Tahun 2012*.

"*Pendapat Para Ahli tentang Pemberdayaan*", <http://www.sarjanaku.com>, Diambil 6 April 2013.

Sartono, (2008). *Pengaruh Kepemimpinan, Profesional, Motivasi, Lingkungan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Pada Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta, STIE AUB, Melalui, <http://e-Journal.stie-aub.ac.id>.

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Daftar pertanyaan ini penulis gunakan untuk melengkapi penulisan TAPM yang sedang penulis laksanakan dengan judul: **“Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan desa Menuju Desa Mandiri (*Studi Kasus di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu*) Kabupaten Indragiri Hilir”**

1. Dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?
2. Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?
3. Dalam menetapkan sasaran program kegiatan Desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra Kerja (BPD dan LPM) ?
4. Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak/ibu apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?
5. Sepengetahuan bapak/ibu strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?
6. Menurut bapak/ibu apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh Kepala Desa ?
7. Dalam pelaksanaan kegiatan Desa mandiri apakah Kepala Desa menunjuk Penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?
8. Apakah Kepala Desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan Desa mandiri ?

9. Apakah Kepala Desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?
10. Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?
11. Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala Desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?
12. Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?
13. Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala Desa sudah baik/ efektif ?
14. Bagaimana menurut bpk/ibu apakah peranan Kepala Desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?
15. Menurut bpk/ibu faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 10.15 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 01/Abu Ma'ah (Ketua BPD)

Tempat : Rumah Abu Ma'ah di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Pagi itu, Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 10.15 WIB, peneliti menemui Ketua BPD Desa Pekan Kamis bernama Abu Ma'ah, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Tn. Abu Ma'ah adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 10.15 WIB. Peneliti mewawancarai Tn. Abu Ma'ah.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, selamat pagi Pak, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kulyah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Sebenarnya banyak potensi yang dimiliki kepala desa dalam mengambil keputusan, diantaranya kepala desa harus melakukan musyawarah dengan seluruh komponen dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, kemudian bisa juga meminta saran dan pendapat dari bawahannya seperti sekdes dan perangkat desa lainnya.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Kami selaku ketua BPD tidak pernah diajak bermusyawarah oleh kepala desa dalam merumuskan sasaran program desa mandiri, padahal dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa salah satu tugas kami selaku BPD adalah meensukseskan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri bersama kepala desa, LPM serta memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Kepala desa dalam menyusun program pemberdayaan desa menuju desa mandiri tidak mengutamakan skala prioritas, tetapi berdasarkan kedekatan kepala desa dengan masyarakat yang akan memanfaatkan program tersebut.*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada ditingkatkan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri tanpa musyawarah.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Sepengetahuan saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *tidak ada yang dapat diteladani dari kepemimpinan kepala desa Pekan Kamis yang sekarang ini, saya merasakan sendiri, coba bayangkan saya selaku ketua BPD yang merupakan mitra kerjanya, selalu ditinggalkan atau tidak dibawa serta dalam merencanakan program pembangunan di desa ini, padahal kepala desa sudah tau bahwa saya dan anggota BPD lainnya itu, sesuai dengan peraturan yang ada sudah jelas tugas dan fungsi kami.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Sepengetahuan saya tidak.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Banyak faktor, diantaranya belum diberdayakannya masyarakat dan lembaga yang ada.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 11.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 02/Ardiansyah (Ketua LPM)

Tempat : Rumah Ardiansyah di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 11.00 WIB, peneliti menemui Ketua LPM Desa Pekan Kamis bernama Ardiansyah, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Tn. Ardiansyah adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.00 WIB. Peneliti mewawancarai Tn. Ardiansyah.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kulyah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Cukup banyak potensi yang dimiliki kepala desa dalam mengambil keputusan, diantaranya kepala desa harus melakukan musyawarah desa dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, seperti dengan LPM dan BPD.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak pernah mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Semestinya kepala desa wajib memberdayakan masyarakat desa, karena sepengetahuan saya, pemberdayaan desa itu adalah bagaimana kepala desa bisa memberikan peranan kepada masyarakat secara lebih luas dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, guna untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Sepengetahuan saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Teladan apa yang dapat diambil dari kepala desa Pekan Kamis yang sekarang ini, kami selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharapkan sebagai lembaga yang banyak mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah terutama dalam hal Kebijakan Pembangunan. LPM adalah ketua pelaksana proses perencanaan pembangunan di desa. Dimana salah satu tugas kami adalah Menyusun rencana kegiatan yang akan dimusyawarahkan dan membuat rumusan hasil musyawarah desa, malah tidak dilibatkan dalam kegiatan ini, artinya kami tidak diberdayakan dalam pembangunan desa, dan kami melihat maunya bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Sepengetahuan saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Banyak , diantaranya kurangnya pemberdayaan.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 11.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 03/H. Hasim Umar (Sekretaris BPD)

Tempat : Rumah H. Hasim Umar di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 11.30 WIB, peneliti menemui Sekretaris BPD Desa Pekan Kamis bernama H. Hasim Umar, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. H.Hasim Umar adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. H. Hasim Umar.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Menjadi kepala desa sudah seharusnya banyak potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan, seperti pengetahuan dan pengalaman, kemudian saran dan pendapat dari orang lain, bisa juga dari media masa seperti koran dan TV.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Bagaimana program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di Desa Pekan Kamis ini bisa berjalan dengan baik kalau dalam penyusunan rencana kegiatan saja, kami selaku anggota BPD tidak pernah dilibatkan. Semestinya kami diajak musyawarah oleh kepala desa, dalam menyusun program kegiatan yang akan dibuat, malah kami hanya sekedar diberitahu, apa yang akan dibangun dan dimana lokasinya.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Strategi yang dilakukan Kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri belum memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi cenderung pada kepentingan kepala desa dan kelompok-kelompok tertentu". (wawancara.*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Belum.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Rasanya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Banyak , diantaranya tidak ada jadwal yang jelas dari kepala desa.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 12.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 04/ Ardani (Kepala Dusun)

Tempat : Rumah Ardani di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 12.00 WIB, peneliti menemui Kepala Dusun, Desa Pekan Kamis bernama Ardani, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Ardani adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 12.00 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Ardani..

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya tidak tahu potensi apa yang harus dimiliki kepala desa.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Saya selaku kepala dusun hanya sekedar diberitahu bahwa ada program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di dusun saya, bagaimana mekanismenya saya tidak pernah di kasih tahu oleh kepala desa.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Selama yang saya ketahui kepala desa Pekan Kamis dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan di desa belum arif dan bijaksana, karena selalu memaksakan kehendak.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Perencanaan tidak jelas.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 12.30 WIB)
- Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
- Subjek Penelitian/Informan : 05/ A. Rahman Sidik (Ketua RW.I)
- Tempat : Rumah A. Rahman Sidik di Desa Pekan Kamis.
- Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.
- Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 12.30 WIB, peneliti menemui Ketua RW. I desa Pekan Kamis bernama A. Rahman Sidik, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bapak A. Rahman Sidik adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 12.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bapak A. Rahman Sidik.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Tentu banyak bu, tapi saya tidak tahu potensi apa saja yang harus dimiliki.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak melibatkan.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Semestinya kepala desa dalam menyusun program desa menuju desa mandiri harus mengutamakan skala prioritas, karena banyak program pembangunan yang harus dilakukan di desa ini, maka untuk memilah dan terbatasnya dana yang ada maka harus dilihat mana yang perlu di prioritaskan.*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Hampir setiap tahun banyak paket kegiatan yang tidak selesai tepat waktu.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Semestnya kepala desa harus sering menjalin komunikasi dengan kami, terutama masalah pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, tapi hal ini jarang sekali kami dapatkan.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Pengaturan waktu yang kurang jelas.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 13.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 06/ Jadri (Ketua RW.II)

Tempat : Rumah Jadri di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Siang itu, Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 13.00 WIB, peneliti menemui Ketua RW.II Desa Pekan Kamis bernama Jadri, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Jadri adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 13.00 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Jadri.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya kurang memahaminya.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Rasanya jarang sekali.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Semestinya kepala desa dalam menyusun program desa menuju desa mandiri harus mengutamakan skala prioritas, karena banyak program pembangunan yang harus dilakukan di desa ini, maka untuk memilah dan terbatasnya dana yang ada maka harus dilihat mana yang perlu di prioritaskan*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Tidak semua paket kegiatan ditetapkan waktu penyelesaiannya oleh kepala desa, padahal ini sangat penting, karena program ini ada batas waktunya, yaitu pada bulan desember setiap tahunnya.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Pengawasan kurang.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 13.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 07/ Ratmir (Ketua RT.01)

Tempat : Rumah Ratmir di Desa Pekan Kamis

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Siang itu, Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 13.30 WIB, peneliti menemui Ketua RT.01 RW.II desa Pekan Kamis bernama Ratmir, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. ratmir adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 13.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Ratmir.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya rasa cukup banyak, diantaranya musyawarah mufakat.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak pernah, tapi pertemuan lain ada.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Menurut saya kepala desa dalam menentukan program kegiatan pemberdayaan desa menuju desa mandiri, belum mengutamakan skala prioritas, saya lihat banyak yang harus diutamakan dalam pembangunan di desa ini, tapi nyatanya banyak pula yang salah sasaran, mungkin ini karena tidak di musyawarahkan terlebih dahulu.*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Menurut saya kurangnya pengawasan.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 15.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 08/ M. Aini (Sekretaris LPM)

Tempat : Rumah M. Aini di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 15.00 WIB, peneliti menemui Sekretaris LPM Desa Pekan Kamis bernama M. Aini, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. M. Aini adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 15.00 WIB. Peneliti mewawancarai M. Aini.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya kurang tahu potensi apa yang dimiliki kepala desa.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak pernah.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Strategi yang dilakukan kepala desa cenderung terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan Kepala desa.*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya belum.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Informasi itu bagi kami sangat penting, agar kami dapat menyiapkan rencana kegiatan secepatnya, dan dengan sebaik-baiknya, tetapi informasi yang kami terima dari kepala desa selalu terlambat, dan itupun segala sesuatunya sudah disiapkan sendiri oleh kepala desa, maka dapat kami katakan komunikasi kami dengan kepala desa belum berjalan sesuai dengan semestinya.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurangnya pengawasan.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 13.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 09/ Ratnawati (Sekretaris Desa)

Tempat : Di Kantor Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Sekretaris Desa yang sudah diangkat menjadi PNS.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 13.30 WIB, peneliti menemui Sekretaris Desa Pekan Kamis bernama Ratnawati, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Ratnawati adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai PNS yang di angkat menjadi Sekretaris desa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 13.30 WIB. Peneliti mewawancarai Ratnawati.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan ibu, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong ibu bantu jawab sesuai apa yang ibu ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut ibu dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Menurut saya, ada berupa pengetahuan dan pengalaman, setelah itu masukan, saran serta informasi dari orang orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak pernah mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut ibu apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan ibu strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut ibu apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Dalam pengelolaan program desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis, kepala desa belum memberdayakan masyarakat, padahal dalam petunjuk teknis sudah dijelaskan bahwa, dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa wajib membentuk dan memfungsikan kelompok kerja (pokja) untuk melaksanakan program desa mandiri, kelompok kerja adalah kumpulan berbagai elemen anggota masyarakat, yang tidak terikat dengan keorganisasiannya dalam kemasyarakatan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Selama ini belum ada yang dapat diteladani dari kepemimpinan kepala desa, seperti kuarang disiplin, selalu memaksakan kehendak sendiri dan dalam mengambil keputusan cenderung kurang bijaksana.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Kepala desa sebelum mengambil keputusan belum pernah meminta masukan dan saran dari saya, padahal banyak hal juga yang perlu saya sarankan demi kebaikan beliau dan kemajuan desa.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Sepengetahuan saya komunikasi kepala desa dengan kami selama ini, menurut saya masih kurang baik dan efektif, karena kepala desa hanya memberiku informasi, bahwa akan ada beberapa program pemberdayaan desa menuju desa mandiri pada tahun itu, mengenai bagaimana mekanismenya kami jarang sekali diberi tahu.*

P : Bagaimana menurut ibu apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut ibu faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurangnya pengawasan dan faktor non teknis lainnya.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 10.00 WIB)
- Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam
- Subjek Penelitian/Informan : 10/ Undul.
- Tempat : Rumah Undul di Desa Pekan Kamis.
- Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.
- Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Pagi itu, Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti menemui Bendahara LPM Desa Pekan Kamis bernama Undul, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Undul adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 10.00 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Undul.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya kurang mengerti.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Rasanya belum melibatkan.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Kepala desa tidak membentuk kelompok kerja di setiap paket kegiatan, walupun ada itu pun hanya pada paket kegiatan tertentu saja, dan yang ditunjukpun orang-orang yang dekat dengan kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak ada diatur.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Tidak ada jadwal yang jelas, dan kurangnya pengawasan.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 10.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 11/ Darmawan (Bendahara BPD)

Tempat : Rumah Darmawan di Desa Pekan Kamis

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 10.30 WIB, peneliti menemui Bendahara BPD Desa Pekan Kamis bernama Darmawan, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Darmawan adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 10.30 WIB. Peneliti mewawancarai Darmawan.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Menurut saya potensinya berdasarkan musyawarah mufakat.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Jarang sekali.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada ditingkatkan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Dalam petunjuk teknis kegiatan sudah ditegaskan bahwa kepala desa harus menunjuk ketua kelompok kerja sebagai penanggung jawab kegiatan, yang tugasnya bertanggung jawab bersama LPM dan pendamping terhadap penyelesaian fisik kegiatan sesuai rancangan teknis. Kemudian bertanggung jawab terhadap kualitas dan kuantitas (volume) fisik kegiatan pembangunan infrastruktur yang dipercayakan dibawah koordinator LPM namun kenyataannya hal ini tidak dilakukan oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Belum ada.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Pengawasan kurang.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 11.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : I2/ Mukhtar (Ketua RT. 03)

Tempat : Rumah Mukhtar di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 11.30 WIB, peneliti menemui Ketua RT. 03 Desa Pekan Kamis bernama Mukhtar, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Mukhtar adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Mukhtar.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 11.40 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 13/ Syafrudin (Ketua RT. 04)

Tempat : Rumah Syafrudin di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 11.40 WIB, peneliti menemui Ketua RT. 04 Desa Pekan Kamis bernama Syafrudin, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Syafrudin adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Syafrudin.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya rasa banyak, tapi saya kurang pàham.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Sepertnya tidak.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak ada, makanya pada tahun 2012 paket kegiatan semenisasi jalan Bakul RT.04 baru selesai 100% pada bulan januari 2013*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Salah satunya kurang koordinasi antara kepala desa dengan elemen masyarakat lainnya.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2013 (Pukul: 10.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 14/ Ajiman (Ketua RT. 05)

Tempat : Rumah Ajiman di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 10.30 WIB, peneliti menemui Ketua RT. 05 Desa Pekan Kamis bernama Ajiman, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Ajiman adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 10.30 WIB. Peneliti mewawancarai Ajiman.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Kepala desa harus menghimpun saran pendapat dari orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Jarang sekali apalagi untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Meskipun ada yang bisa dilihat segi positifnya, tapi lebih banyak yang tidak bisa diteladani dari kepala desa Pekan Kamis.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Bagaimana kepala desa dapat dikatakan arif dan bijaksana dalam keputusannya, kalau kepala desa itu mengambil keputusan sendiri saja tanpa melibatkan komponen masyarakat.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurangnya koordinasi.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 13.45 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 15/ Syahdan Z. (Kaur Pembangunan)

Tempat : Kantor Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai tenaga honor di kantor desa.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 13.45 WIB, peneliti menemui Kaur Pembangunan Desa Pekan Kamis bernama Syahdan Z, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Syahdan Z. adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai tenaga honor di Kantor desa Pekan Kamis.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 13.45 WIB. Peneliti mewawancarai Syahdan Z.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Banyak potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan, seperti pengetahuan dan pengalaman, kemudian saran dan pendapat dari orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Sepertinya Tidak.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Sebagai kepala urusan pembangunan di desa ini, seharusnya kepala desa terlebih dahulu menyerahkan perencanaan pembangunan kepada saya, kemudian baru dibawa dalam musyawarah desa dengan lembaga desa dan tokoh masyarakat, tapi kenyataannya selama ini, rasanya belum pernah dilakukan oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Komunikasi kepala desa dengan kami sangat jarang sekali, sepengetahuan saya komunikasi antara kepala desa dengan kami sekedarnya saja, dan yang dibicarakan yang penting-penting saja.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurangnya koordinasi.*

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 14.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 16/ Arbain NP. (Kaur Umum)

Tempat : Kantor Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Tenaga honor di Kantor desa Pekan Kamis.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Senin, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 14.00 WIB, peneliti menemui Kaur Umum Desa Pekan Kamis bernama Arbain NP. minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Arbain NP. adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai tenaga honor di Kantor Desa Pekan Kamis.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Arbain NP.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Banyak potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan, seperti pengetahuan dan pengalaman, kemudian saran dan pendapat dari orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Saya ragu tapi, jarang sekali mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada ditingkatkan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Kepala desa tidak pernah memberikan motivasi kepada bawahan, bahkan kepala desa membiarkan perangkat desa kerja masing-masing.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurang pengawasan dan koordinasi.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2013 (Pukul: 14.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 17/ Herman (Kaur Pemerintahan)

Tempat : Kantor Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Tenaga honor di Kantor Desa Pekan Kamis.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 20 Mei 2013, sekitar pukul 14.00 WIB, peneliti menemui Kaur Pemerintahan Desa Pekan Kamis bernama Herman, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Herman adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai tenaga honor di kantor desa Pekan Kamis sebagai Kaur Pemerintahan.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Herman.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Pengetahuan dan pengalaman, kemudian saran dan pendapat dari orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Saya lihat tidak.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada ditingkatkan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Kepala desa seolah-olah tidak mau tahu dengan apa yang harus kami kerjakan, sementara kami selaku bawahan sangat memerlukan arahan, petunjuk dan bimbingan dari pimpinan dalam hal ini kepala desa, sehingga kami tidak kehilangan arah dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Belum.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurang koordinasi.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 15.30 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 18/ Syamsudin (Ketua Pokja I)

Tempat : Rumah Syamsudin di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 15.30 WIB, peneliti menemui Ketua Pokja I Desa Pekan Kamis bernama Syamsudin, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Syamsudin adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 15.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Syamsudin.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saya kurang paham bu.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Sepertinya tidak.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada ditingkatkan.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Komunikasi kami dengan kepala desa jarang sekali, sehingga informasipun jarang juga kami terima dari kepala desa.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurang kerja sama.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 (Pukul: 16.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 19/ Abdul Hamid (Ketua Pokja II)

Tempat : Rumah Abdul Hamid di Desa Pekan Kamis.

Karakteristik Informan : Masyarakat biasa yang bekerja sebagai petani berkebun.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Sabtu, Tanggal 11 Mei 2013, sekitar pukul 16.00 WIB, peneliti menemui Ketua Pokja II Desa Pekan Kamis bernama Abdul Hamid, minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Abdul Hamid adalah biasa-biasa saja, beliau sehari-hari bekerja sebagai petani berkebun kelapa.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 16.00 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk. Abdul Hamid.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis ini.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Saran dan pendapat dari orang lain.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Rasanya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Tidak pernah mengadakan musyawarah untuk membicarakan rencana dan sasaran program desa mandiri.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Belum*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Ditunjuk sendiri oleh kepala desa*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Setahu saya tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Setahu saya tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Rasanya belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Meskipun antara kami dengan kepala desa ada melakukan komunikasi, tapi yang kami bicarakan hanya hal-hal biasa yang kami alami dalam hidup sehari-hari.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum.*

P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?

I : *Kurang kerja sama.*

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2013 (Pukul: 10.00 WIB)

Cara Pengumpulan Data : Wawancara mendalam

Subjek Penelitian/Informan : 20/ Drs. H. M. Yusuf N. (Camat Tembilahan Hulu)

Tempat : Kantor Camat Tembilahan Hulu.

Karakteristik Informan : PNS, Jabatan Camat Tembilahan Hulu.

Keterangan : P = Peneliti, I = Informan

SETTING WAWANCARA

Hari Rabu, Tanggal 05 Juni 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, peneliti menemui Camat Tembilahan Hulu bernama Drs.H.M. Yusuf N., minta izin untuk melakukan wawancara tentang peranan Kepala Desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri.

Sosok Bpk. Drs.H.M.Yusuf N., adalah bersahaja dan ramah, beliau diangkat menjadi Camat Tembilahan Hulu sejak Tahun 2010.

Sesuai dengan persiapan yang telah peneliti siapkan, sekitar pukul 11.30 WIB. Peneliti mewawancarai Bpk Drs.H.M.Yusuf N.

ISI WAWANCARA

P : Assalamu'alaikum, saya Muryusna pak. Saya disini ingin melakukan wawancara dengan bapak, karena saya ingin mengetahui peranan kepala desa Pekan Kamis dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis, tolong bapak bantu jawab sesuai apa yang bapak ketahui dan apa adanya, karena saat ini saya lagi menyusun tesis penelitian dan saya kuliah di UT, mengambil Megister Administrasi Publik. Saya ingin melakukan penelitian tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu.

P : Menurut bapak dalam pengambilan keputusan, potensi apa sajakah yang dimiliki oleh kepala desa ?

I : *Banyak potensi yang dimiliki kepala desa dalam mengambil keputusan, seperti pengetahuan dan pengalaman pribadi, kemudian saran dan pendapat, serta masukan dari berbagai pihak, kemudian dirumuskan dalam musyawarah dan mufakat.*

P : Apakah kepala desa sudah memanfaatkan potensi tersebut dalam program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Dalam menetapkan sasaran program kegiatan desa mandiri, apakah Kepala desa melibatkan mitra kerja (BPD dan LPM) ?

I : *Informasi yang saya dapat tidak melibatkan.*

P : Dalam menyusun program Desa mandiri, menurut bapak apakah Kepala Desa sudah mengutamakan skala prioritas ?

I : *Saya lihat selama ini belum*

P : Sepengetahuan bapak strategi yang dilakukan Kepala Desa dalam menyusun program kegiatan, apakah sudah memperhatikan kepentingan masyarakat ?

I : *Laporan yang saya terima dari masyarakat belum.*

P : Menurut bapak apakah alokasi sumber daya yang ada, selalu ditingkatkan oleh kepala desa ?

I : *Sepengetahuan saya belum ada.*

P : Dalam pelaksanaan kegiatan desa mandiri apakah kepala desa menunjuk penanggung jawab atau kelompok kerja paket kegiatan ?

I : *Katanya ditunjuk, tapi ditunjuk sendiri oleh kepala desa.*

P : Apakah Kepala desa mengatur waktu penyelesaian kegiatan desa mandiri ?

I : *Laporan masyarakat mengatakan tidak pernah.*

P : Apakah Kepala desa sudah memberi contoh keteladanan kepada bawahan dalam bekerja ?

I : *Menurut saya belum.*

P : Setiap mengambil keputusan, apakah Kepala desa sudah arif dan bijaksana dalam keputusan itu ?

I : *Rasanya belum.*

P : Sebelum mengambil keputusan apakah Kepala desa terlebih dahulu meminta masukan dari bawahan dan mitra kerja ?

I : *Informasi dari perangkat desa tidak ada.*

P : Apakah Kepala Desa selalu memotivasi bawahan ?

I : *Perangkat desa mengatakan belum.*

P : Apakah komunikasi yang dilakukan Kepala desa sudah baik/ efektif ?

I : *Kalau dengan pihak Kecamatan cukup baik.*

P : Bagaimana menurut bapak apakah peranan Kepala desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

I : *Belum, kami mengakui pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa Pekan Kamis mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak berjalan sebagaimana mestinya, setelah kami telusuri dan kami pelajari penyebabnya adalah, mekanisme yang telah ditetapkan oleh BPMPD, tidak dilaksanakan oleh kepala desa, seperti musyawarah desa, penetapan lokasi kegiatan, pembentukan kelompok kerja semua itu tidak dilakukan oleh kepala desa, kalau itu ada semua itu hanya ditentukan dan ditunjuk sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan mitra kerjanya yaitu BPD dan LPM. Sehingga peran masing-masing lembaga desa itu tidak berjalan dengan semestinya, dengan demikian tentu akan berdampak terhadap hasil pekerjaan, dimana kita ketahui dari tahun 2008 itu, sampai akhir tahun anggaran tidak ada pekerjaan yang adapat diselesaikan 100%. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah, melakukan pembinaan kepada kepala desa, mengajak seluruh komponen masyarakat agar mau bekerja sama dengan kepala desa, mengawasi dan memantau secara berkala pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri ini, memfasilitasi kegiatan, dan terakhir pada tahun 2012 kegiatan ini sesuai petunjuk Bupati Indragiri Hilir, melalui BPMPD kabupaten Indragri Hilir diambil alih pelaksanaannya oleh pihak Kecamatan, hal ini dilakukan karena pada tahu 2011 pencapaian programnya juga masih gagal atau tidak mencapai target. Meskipun di tahun 2012 pencapaiannya juga belum maksimal, tetapi progresnya sudah cukup tinggi, hal ini bukan disebabkan oleh mekanisme, tetapi dikarenakan oleh faktor non teknis di lapangan, seperti sulitnya mendapatkan bahan material, hal ini juga telah diketahui oleh BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir. Kedepannya kami akan terus melakukan pembinaan terhadap kepala desa dan seluruh komponen masyarakat di desa Pekan Kamis, mudah-mudahan di tahun 2013 ini akan ada perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa menuju desa mandiri di desa pekan Kamis ini.*

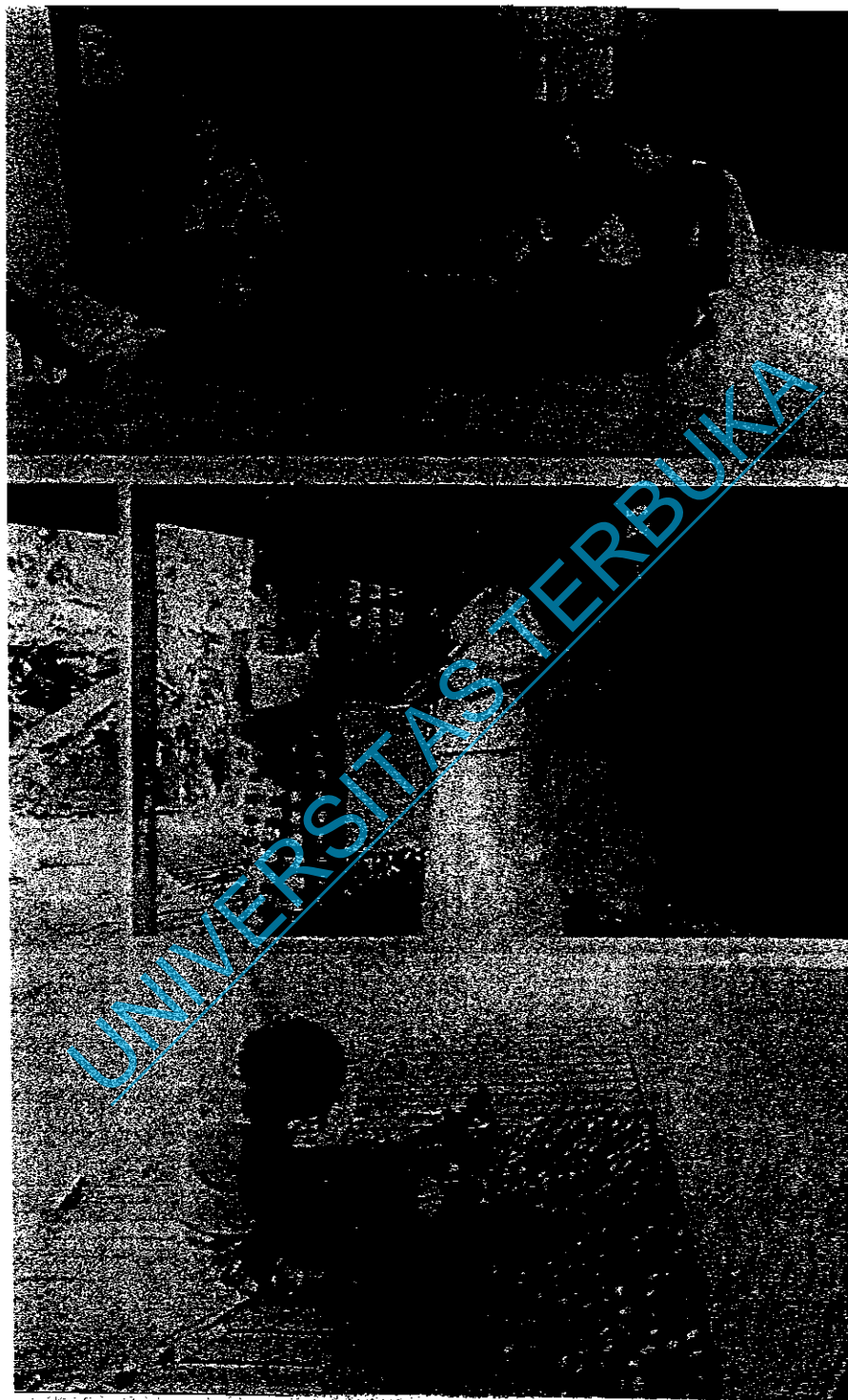
- P : Menurut bapak faktor apa yang menyebabkan, tidak selesainya pekerjaan program desa mandiri tepat waktu ?
- I : *Cukup Banyak , diantaranya kurang koordinasi, kurang pengawasan, dan kurang kerja sama.*

UNIVERSITAS TERBUKA



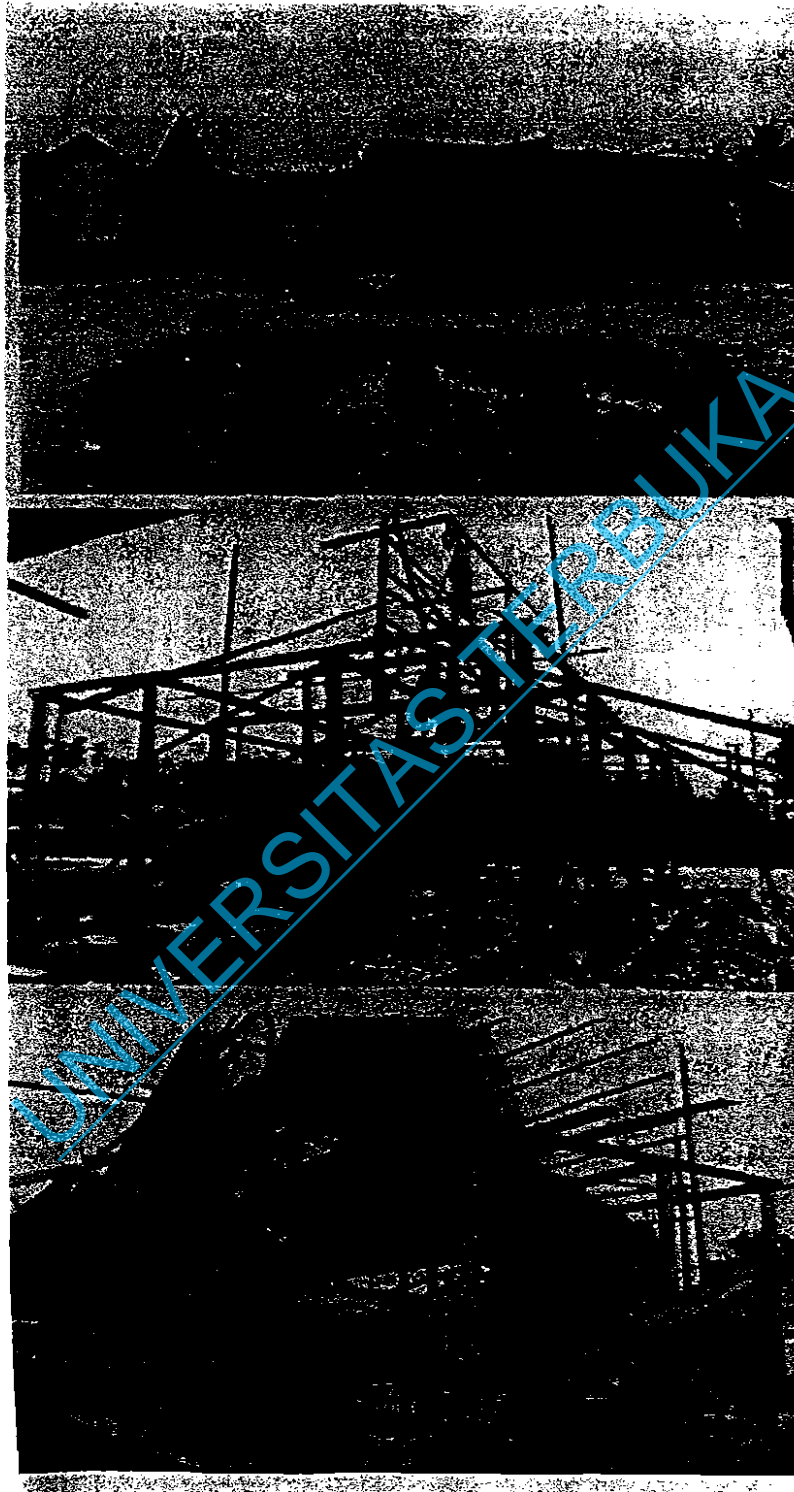














KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PEKAN KAMIS
 Jl. Impres Pekan Kamis

Pekan Kamis, 30 Agustus 2010

Kepada Yth :

Kepala BPMD Indragiri Hilir
 di -

No : 05 / BPD/PK/2010

Lamp :

Hal : Pengangkatan dan Pemberhentian
 Staf Desa (Bendahara Desa)

Tembilahan

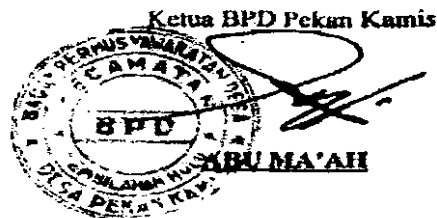
Menanggapi surat Kepala Desa tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara desa Pekan Kamis No. 04 / KPTS / PK / VIII / 2010 tanggal 28 Juli 2010, kami ketua BPD beserta ang menanggapi hal tersebut diatas bahwa pengangkatan dan pemberhentian staf desa yaitu bendahara tanpa sepengetahuan dan musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD Desa Pekan Kamis. Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Desa harus mendapatkan persetujuan BPD, yang disampaikan Kepala Desa hanya tembusan keputusan Kepala Desa dan musyawarah yang dimaksud Kepala D tertanggal 26 Juli 2010 tersebut adalah musyawarah perencanaan pembangunan fisik desa tahun 2010. Bukan musyawarah pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Desa, dan dapat ka sampaikan bahwa pelaksanaan Desa Mandiri Tahun 2010 sedang berjalan dan sekarang menung pencairan tahap I fisik.

Demikian kami sampaikan agar Bapak Kepala BPMD Kabupaten Indragiri Hilir dap mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Desa Pekan Kamis dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Anggota :

1. H. Hasyim Umar
2. Sukri
3. Hasan
4. Ruslan
5. Tairo
6. Hadiyanto

(.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....)



Tembusan :

1. Kepada Yth. Kepala Inspektor Inspektorat Kab. Indragiri Hilir di tembilahan
2. Kepada Yth. Camat Tembilahan Hulu di Tembilahan Hulu
3. Kepada Yth. Kepala Desa Pekan Kamis di Pekan Kamis

PHOTO DOKUMENTASI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA OTONOMI MENUJU DESA MANDIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2011

DESA PEKAN KEMIS
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU




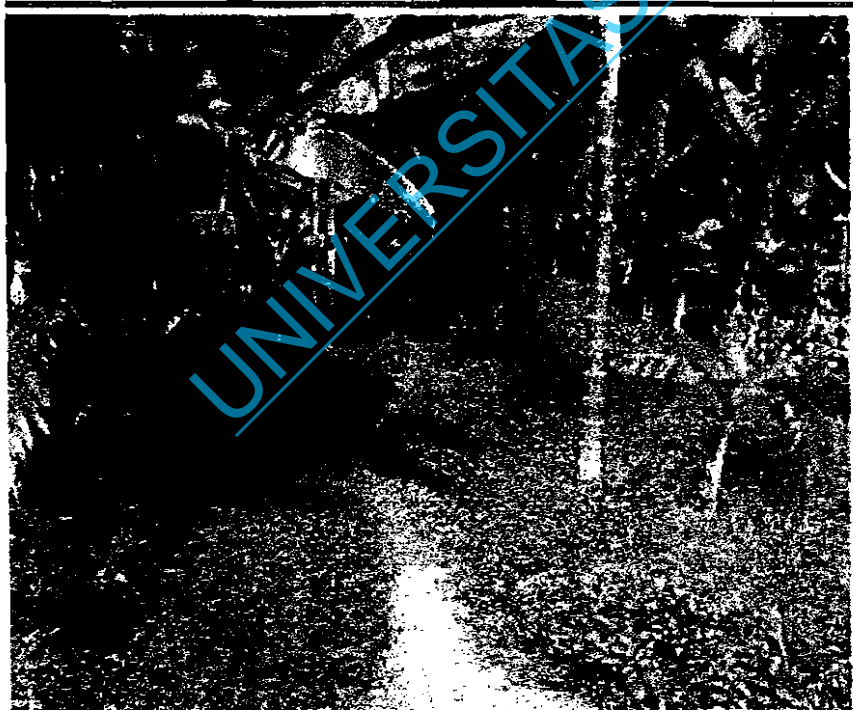
	<p>PAKET A</p> <p>KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR</p> <p>VOLUME 44 M</p> <p>LOKASI KANTOR DESA</p> <p>KONDISI 0%</p>
	<p>PAKET B</p> <p>KEGIATAN Semensasi Jalan</p> <p>VOLUME 75 00 x 1 20 x 0.10 M</p> <p>LOKASI Gg. Bakul</p> <p>KONDISI 0%</p>

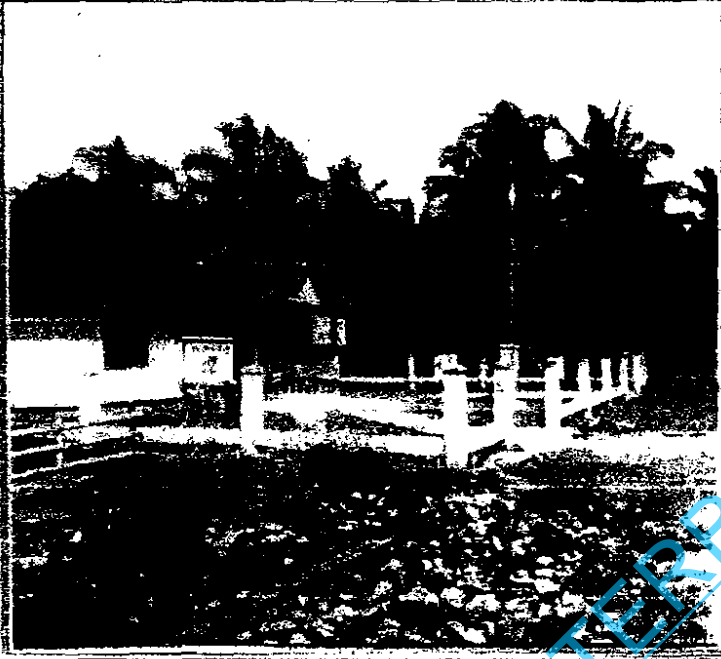

PHOTO DOKUMENTASI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA OTONOMI MENUJU DESA MANDIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2011

DESA PEKAN KEMIS
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU

	<p align="center">PAKET C</p> <p align="center">KEGIATAN PEMBANGUNAN WC POSYANDU</p> <p align="center">VOLUME 2.00 x 3.00 M</p> <p align="center">LOKASI RT 04</p> <p align="center">KONDISI 0%</p>
	<p align="center">PAKET D</p> <p align="center">KEGIATAN Pembuatan Jalan Tanah</p> <p align="center">VOLUME 1800,00 x 2,00 x 0.80 M</p> <p align="center">LOKASI Pekan Kemis</p> <p align="center">KONDISI 0%</p>

Pekan Kemis, Oktober 2011
 Dibuat oleh :
 Ketua Pelaksana Kegiatan Fisik
 (LPM)
 Desa Pekan Kemis

PHOTO DOKUMENTASI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA OTONOMI MENUJU DESA MANDIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2011

	<p style="text-align: center;">PAKET B</p> <p style="text-align: center;">KEGIATAN SEMENTASASI JALAN</p> <p style="text-align: center;">VOLUME 12 X 1,25 X 0,10 M</p> <p style="text-align: center;">LOKASI KANTOR DESA</p> <p style="text-align: center;">KONDISI 100%</p>
	<p style="text-align: center;">PAKET D</p> <p style="text-align: center;">KEGIATAN PEMBUATAN BAGIAN JALAN TANAH</p> <p style="text-align: center;">VOLUME 185 X 2 X 0,80 M</p> <p style="text-align: center;">LOKASI PEKAN KAMIS</p> <p style="text-align: center;">KONDISI 100%</p>

Pekan Kamis - Desember 2011

Dibuat oleh

Ketua Pelaksana Kegiatan Fisik

(LPM)

Pekan Kamis



IRANSYAH